

**STUDI KEBUTUHAN SEKOLAH MENENGAH
DI KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO**

T E S I S

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota**

Oleh :

**SABAR RIYANTO
L4D007079**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

**STUDI KEBUTUHAN SEKOLAH MENENGAH
DI KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh:

SABAR RIYANTO
L4D007079

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 25 Maret 2009

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 25 Maret 2009

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama

M. Mukti Ali, SE, M.Si, MT

Ir. Retno Susanti, MT

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

DR. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebut dalam Daftar Pustaka.

Semarang, Maret 2009

SABAR RIYANTO

NIM L4D 007 079

.....
*sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan
Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap
(QS. Alam nasyrah 6-8)*

.....
*boleh jadi kamu membenci sesuatu
padahal ia amat baik bagimu
dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu
padahal ia amat buruk bagimu
Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui
(QS AlBaqarah 216)*

*Buat orang-orang tercinta yang telah
mencurahkan segenap kasih sayang, do'a,
ketulusan & pengorbanan dan menemaniku
melewati hari-hari penuh hikmah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kekuatan, kesehatan, dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis yang berjudul “ **STUDI KEBUTUHAN SEKOLAH MENENGAH DI KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO**”.

Pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Biro Kerjasama Luar Negeri (BKLN) Departemen Pendidikan Nasional sebagai pemberi Beasiswa Unggulan.
2. Bupati Wonosobo yang telah berkenan memberi ijin untuk pelaksanaan tugas belajar.
3. DR. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc selaku Ketua Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro
4. Ir. Retno Susanti, MT selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama penulisan tesis ini.
5. M. Mukti Ali, SE, M.Si, MT selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama penulisan tesis ini.
6. Dr. Ing. Asnawi Manaf selaku dosen Penguji yang telah memberi banyak masukan bagi perbaikan penyusunan tesis ini
7. Prihadi Nugraha, ST, MT, MPP selaku dosen Penguji yang telah memberi banyak masukan bagi perbaikan penyusunan tesis ini.
8. Rekan rekan mahasiswa beasiswa unggulan Diknas 2A MTPWK Universitas Diponegoro yang saling memberi semangat.
9. Semua pihak yang telah membantu selesainya tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan. Saran dan tanggapan yang membangun dari pembaca maupun pihak-pihak yang terkait dalam usaha penyempurnaan materi dan penulisan tesis ini sangat penulis harapkan .

Semarang, Maret 2009

Penulis

ABSTRAK

Salah satu tujuan pembangunan pendidikan nasional seperti yang tertera dalam rencana strategis dinas pendidikan nasional adalah meningkatkan pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dengan jumlah penduduk sebesar 77.509 jiwa dan penduduk usia sekolah menengah sebanyak 4.719 jiwa serta APK sebesar 9,42 serta APM sebesar 6,83 dengan hanya memiliki satu sekolah menengah yang berdaya tampung 480 siswa kebutuhan akan sekolah menengah dirasa sangat kurang karena belum bisa menjangkau seluruh wilayah Kecamatan Kertek. Maka untuk pemerataan kesempatan belajar pada sekolah menengah perlu dikaji kebutuhan sekolah menengah di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji kebutuhan sekolah menengah di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo berupa banyaknya sekolah menengah yang dibutuhkan, jenis sekolah yang ditentukan serta penempatan lokasi sekolah menengah. Sasaran studi ini adalah teridentifikasinya kondisi sekolah menengah yang ada, teridentifikasinya minat lulusan SLTP yang akan melanjutkan ke jenjang sekolah menengah, teridentifikasinya jumlah kebutuhan sekolah menengah, teridentifikasinya jenis sekolah menengah dan ditentukannya lokasi sekolah menengah.

Di dalam studi ini digunakan pendekatan campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data yang dibutuhkan adalah data primer berupa minat siswa untuk melanjutkan ke sekolah menengah yang didapat dengan kuesioner. Sampel yang digunakan adalah simple random sampling sebanyak 260 responden yang dibagi berdasarkan prosentase dari siswa SLTP se Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo tahun 2009. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kabupaten dalam angka, kecamatan dalam angka serta profil pendidikan.

Berdasarkan data primer dan data sekunder diketahui ketersediaan ruang kelas di SMA Negeri I Kertek sebanyak 15 ruang kelas dengan daya tampung sebanyak 480 siswa dan jangkauan layanan sampai sejauh 21 km. Dengan pemecahan penduduk lima tahunan ditemukan bahwa penduduk usia sekolah menengah sebanyak 4.719 jiwa, dari hasil ini proyeksi siswa berdasarkan rata rata APK kabupaten sebanyak 1.545 siswa. Berdasarkan perhitungan proyeksi kebutuhan ruang kelas masih dibutuhkan lagi tambahan 30 ruang kelas baru. Sedangkan dari minat masyarakat diperoleh data 65% siswa dan 64% orang tua memilih sekolah menengah kejuruan untuk kelanjutan pendidikannya. Sebanyak 71% masyarakat setuju untuk dibangun sekolah menengah kejuruan. Dari minat masyarakat dan kebijakan pemerintah maka di Kecamatan Kertek perlu dibangun sekolah menengah kejuruan. Arah lokasi sekolah menengah yang disarankan berdasarkan analisis adalah di Desa Candimulyo dan Desa Candiyanan.

Keyword : kebutuhan, sekolah menengah

ABSTRAC

One purpose of national educational development like on the strategic planing of national educational institusion is to increase the distribution of study opportunity at all program, kinds and educational level. Kertek sub district, Wonosobo Regency have total cityzen as 77.509 person and for high school age as 4.170 person, APK as 9,42 and APM as 6,83 it is only have one high school building can receive 480 studen only. So the need of high school is luck because not reach to all Kertek sub district region yet. So to distribution the study opportunity athigh school student need explored about school necessity at Kertek Subdistrict Wonosobo Regency.

The purpose of this study is explore the high school necessity at Kertek Subdistrict Wonosobo Regency, it is about the total of high school building which is needed, the kind of shool which is determined and also the placement of high school location. The object of this study is identify the high school condition have built, to identify the planing program of yunior high school graduation who want to continue to senior high school, to identify the total of senior high school necessity, to identify the kind of senior high school and determine the senior high school location.

In this study using qualitative and quantitative appraoch. The data is primary data as planing program of the student to be continue to senior high school which is gotten by questioner. The sample used is simple random sampling as 260 sample which is divided base on percentage from yunior high school student at Kertek Subdistrict Wonosobo Regency on 2009. While secondary data is gotten from regency as numeric data and from subdistrict as numeric data also educational profile.

Base on primary and secondary data known that class room at state senior high school I Kertek as 15 class room with receive as 480 student and can give service until 21 km. From the data every five year found that senior high school citizen age as 4.719 person, from this result the student projection base on average regency APK as 1.545 student. Based on projection class room needs still need the add 30 new class room. While from program society gotten the data about 65% student and 64% parents choice the private high school for their continued educational. As 715 society agree to built private senior high school. From society interest and goverment policy so at Kertek Subdistrict need built private high school. The location of high school base on analize at Candimlyo village and Candiyan Village.

Key words : necessity, high school

	1.7.6 Teknik Analisis Data	23
	1.8. Kerangka Penulisan Hasil Studi	24
BAB II	KAJIAN KEBUTUHAN SEKOLAH MENENGAH	
	2.1. Tinjauan Tentang Kebutuhan Sekolah Menengah	26
	2.1.1. Kebutuhan	26
	2.1.2. Sekolah Menengah	26
	2.1.3. Kebutuhan Sekolah Menengah	27
	2.1.4. Kebutuhan Sekolah Dalam Isu Stretegis Pendidikan...	28
	2.2. Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan	30
	2.2.1 Jalur Pendidikan	30
	2.2.2 Jenjang Pendidikan	31
	2.2.3 Jenis Pendidikan	32
	2.3. Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan	34
	2.3.1 Program Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun	34
	2.3.2 Program Pendidikan Menengah	34
	2.3.3. Standar Sarana Prasarana Sekolah Menengah Atas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan no 24 Tahun 2007 dan Standar Sarana Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan no 40 Tahun 2008	36
	2.4. Proyeksi Kebutuhan Sekolah Menengah	39
	2.4.1 Pemecahan Penduduk Lima Tahunan Menjadi Tahunan	39
	2.4.2 Angka Pertumbuhan Siswa	43
	2.4.3 Proyeksi Penduduk Usia Sekolah	43

2.4.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)	44
2.4.5	Proyeksi Kebutuhan Ruang Kelas	45
2.5.	Pemilihan Jenis Sekolah Menengah	47
2.5.1	Kebijakan Publik	48
2.5.2	Kebijakan Pemerintah	49
2.5.3	Perencanaan Pendidikan	51
2.6.	Tinjauan Teori Lokasi	53
2.6.1	Teori Tempat Pemusatan	54
2.6.2.	Letak Sekolah Dalam Teori Lokasi	56

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

3.1.	Gambaran Umum wilayah Kabupaten Wonosobo	66
3.1.1.	Kondisi Pendidikan	67
3.1.2.	Kondisi Kependudukan	69
3.1.3.	Kondisi Geografi	70
3.1.4.	Kondisi Perekonomian	71
3.1.5.	Kondisi Sarana Prasarana Transportasi	71
3.2.	Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Kertek	72
3.2.1.	Karakteristik Fisik	73
3.2.1.1	Topografi dan Morfologi	73
3.2.1.2	Kondisi Geologi	73
3.2.1.3	Iklim	73
3.2.2.	Karakteristik Non Fisik	74

	3.2.2.1 Administrasi	74
	3.2.2.2 Kependudukan	76
	3.2.2.3 Pendidikan	79
BAB IV	ANALISA KEBUTUHAN SEKOLAH MENENGAH	
4.1.	Gambaran Umum Sekolah Menengah Yang Ada	83
4.1.1.	Ketersediaan Ruang Kelas	84
4.1.2.	Daya Tampung sekolah	85
4.1.3.	Jangkauan Sekolah	89
4.2.	Analisa Penduduk Usia Sekolah dan Proyeksi Siswa	92
4.2.1.	Pemecahan Penduduk lima Tahunan	92
4.2.2.	Proyeksi Siswa	97
4.2.3.	Proyeksi Kebutuhan Ruang Kelas dan Kebutuhan Sekolah Menengah	98
4.3.	Analisa Minat Lulusan SLTP Untuk Melanjutkan ke Sekolah Menengah	101
4.4.	Analisa Jenis Sekolah Menengah	110
4.5.	Analisa Penentuan Lokasi Sekolah	111
4.6.	Sintesa Analisis	120
BAB V	PENUTUP	
5.1.	Temuan Studi	122
5.2.	Kesimpulan	123
5.3.	Rekomendasi	124
DAFTAR PUSTAKA		126
LAMPIRAN		129

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	: <i>Sarana Pendidikan, Kependudukan dan Angka Partisipasi</i>	4
TABEL I.2	: <i>Data Yang Digunakan</i>	16
TABEL I.3	: <i>Jumlah Siswa SLTP se Kecamatan Kertek Tahun 2008-2009</i>	20
TABEL I.4	: <i>Tabel Krecjie Untuk Perhitungan Sampel</i>	21
TABEL II.1	: <i>Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m²/peserta didik)</i>	37
TABEL II.2	: <i>Luas minimum lantai bangunan</i>	37
TABEL II.3	: <i>Bilangan Pengali Spraque</i>	40
TABEL II.4	: <i>Sintesa Variabel</i>	61
TABEL III.1	: <i>Indikator pemerataan pendidikan Kabupaten Wonosobo Tahun 2006</i>	67
TABEL III.2	: <i>Data Pokok SMA, MA dan SMK Tahun 2006/2007</i>	68
TABEL III.3	: <i>Keadaan Demografi Kabupaten Wonosobo Tahun 2006</i>	69
TABEL III.4	: <i>Keadaan Geografi Kabupaten Wonosobo Tahun 2006</i>	70
TABEL III.5	: <i>Keadaan Perekonomian Kabupaten Wonosobo Tahun 2006</i>	71
TABEL III.6	: <i>Keadaan Transportasi dan Komunikasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2006</i>	72
TABEL III.7	: <i>Banyaknya Dukuh, Dusun, RW dan RT</i>	74
TABEL III.8	: <i>Jarak dan Waktu tempuh dari desa ke ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten</i>	75
TABEL III.9	: <i>Jumlah penduduk, luas wilayah dan kepadatan penduduk Di Kecamatan Kertek tahun 2006</i>	76
TABEL III.10	: <i>Penduduk menurut kelompok umur dirinci menurut jenis kelamin.Di Kecamatan Kertek tahun 2007</i>	77
TABEL III.11	: <i>Penduduk menurut kelompok umur dirinci menurut jenis kelamin.Di Kecamatan Kertek tahun 2007</i>	78
TABEL III.12	: <i>Banyaknya Sarana Pendidikan SLTP , SLTA, Murid dan Guru</i>	79
TABEL III.13	: <i>Banyaknya Siswa SLTA dan SLTP Selama Tiga Tahun Terakhir Kecamatan Kertek Tahun 2007</i>	81
TABEL IV.1	: <i>Ketersediaan Ruang Kelas Dan Ruang Lainnya SMA Negeri I Kertek Tahun Pelajaran 2008-2009</i>	85
TABEL IV.2	: <i>Data Siswa Tiga Tahun Terakhir SMA Negeri I Kertek</i>	86
TABEL IV.3	: <i>Data Siswa Menurut Kelompok Umur SMA Negeri I Kertek Tahun 2008-2009</i>	87
TABEL IV.4	: <i>Siswa Dari Luar Kecamatan Kertek SMA Negeri I</i>	89

	<i>Kertek Tahun 2008-2009</i>	
<i>TABEL IV.5</i>	<i>: Data Dan Proyeksi Penduduk Usia Sekolah Menengah Kecamatan Kertek 2006-2009</i>	<i>93</i>
<i>TABEL IV.6</i>	<i>: Jumlah Penduduk Dan Proyeksi Penduduk Kecamatan Kertek.....</i>	<i>95</i>
<i>TABEL IV.7</i>	<i>: Tabel Sprague Untuk Pemecahan Penduduk Tahunan Usia 10-14 Sampai 70-74</i>	<i>95</i>
<i>TABEL IV.8</i>	<i>: Data Dan Proyeksi Penduduk Kecamatan Kertek</i>	<i>99</i>
<i>TABEL IV.9</i>	<i>: Kebutuhan Sekolah Menengah Di Kecamatan Kertek Tahun 2009 Berdasarkan Aspek Normatif</i>	<i>100</i>

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I.1	: Peta Administrasi Kabupaten Wonosobo.....	7
GAMBAR I.2	: Peta Administrasi Kecamatan Kertek.....	8
GAMBAR 1.3	: Kerangka Pikir	10
GAMBAR 1.4	: Diagram Kerangka Analisis	12
GAMBAR 1.5	: Grafik Prosentase Sampel	23
GAMBAR 2.1	: Isu Strategis Pendidikan	28
GAMBAR 2.2	: Kebijakan Dalam Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan	29
GAMBAR 2.3	: Keterkaitan Antara Model Proyeksi dengan hasil yang diperoleh	39
GAMBAR 2.4	: Model Terjadinya Area Pelayanan Heksagonal Christaller	55
GAMBAR 3.1	: Peta Sebaran SLTP dan SLTA Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo	80
GAMBAR 4.1	: Jumlah Siswa SMA Negeri I Kertek Tiga Tahun Terakhir	87
GAMBAR 4.2	: <i>Jumlah Siswa Menurut Kelompok Umur SMA Negeri I Kertek Tahun 2008-2009</i>	88
GAMBAR 4.3	: Peta Jangkauan Pelayanan SMA N I Kertek Kabupaten Wonosobo	90
GAMBAR 4.4	: Peta Trayek Angkutan Umum dan Sebaran Sekolah Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo	91
GAMBAR 4.5	: Peta Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menengah Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo	94
GAMBAR 4.6	: Alat Transportasi Yang Digunakan	102
GAMBAR 4.7	: Grafik Pekerjaan Orang Tua	102
GAMBAR 4.8	: Grafik Minat Siswa Tiap Sekolah Memilih Sekolah Menengah	103
GAMBAR 4.9	: Grafik Penghasilan Orang Tua	104
GAMBAR 4.10	: Pilihan Melanjutkan Ke Sekolah Menengah	105
GAMBAR 4.11	: Pilihan Program Keahlian di SMK	106
GAMBAR 4.12	: Pilihan Jurusan Di SMA	106
GAMBAR 4.13	: Grafik Pilihan Lokasi Sekolah Menengah	107
GAMBAR 4.14	: Keberadaan Sekolah Menengah Di Kecamatan Kertek	108
GAMBAR 4.15	: Grafik Pendapat Untuk Dibangun Sekolah Menengah	108
GAMBAR 4.16	: Pilihan Jenis Sekolah Menengah Yang Akan Dibangun	109

GAMBAR 4.17	: Alur Pemikiran Pemilihan Sekolah Menengah	112
GAMBAR 4.17	: Peta Jangkauan Pelayanan SMA Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo	114
GAMBAR 4.18	: Peta Jangkauan Jalan Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo	115
GAMBAR 4.19	: Peta Kepadatan Penduduk Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo	117
GAMBAR 4.20	: Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo	118
GAMBAR 4.21	: Peta Arahkan Lokasi Sekolah Menengah Baru Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo	119
GAMBAR 4.22	: Peta Analisis Arahkan Dan Jangkauan Lokasi SM Baru Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo	121

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	: Kuesioner	129
LAMPIRAN 2	: Hasil Pengisian Kuesioner SMP Negeri I Kertek	133
LAMPIRAN 3	: Hasil Pengisian Kuesioner SMP Negeri 2 Kertek	137
LAMPIRAN 4	: Hasil Pengisian Kuesioner SMP Negeri 3 Kertek	140
LAMPIRAN 5	: Hasil Pengisian Kuesioner SMP Muhammadiyah Kertek	143
LAMPIRAN 6	: Hasil Pengisian Kuesioner MTs Ma'arif Kertek	145
LAMPIRAN 7	: Profil Responden	148
LAMPIRAN 8	: Rekapitulasi Minat Siswa SLTP Memilih Sekolah Menengah di Kecamatan Kertek Tahn 2009	149
LAMPIRAN 9	: Rekapitulasi Minat Orang Tua Memilih Sekolah Menengah di Kecamatan Kertek Tahn 2009	151
LAMPIRAN 10	: Surat Surat Perijinan	152

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No 20 Tahun 2003).

Salah satu tujuan pembangunan pendidikan nasional seperti yang tertera dalam rencana strategis dinas pendidikan nasional adalah meningkatkan pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan (Renstra Depdiknas 2005-2009)

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Renstra Depdiknas 2005-2009).

Kabupaten Wonosobo dalam rangka mencapai tujuan pemerataan pendidikan memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan dasar 9 tahun yang dilanjutkan dengan program wajib belajar 12 tahun. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan minimal setingkat SLTA. Sasaran Program ini adalah masyarakat kabupaten Wonosobo yang berusia setinggi tingginya 21 tahun yang belum menempuh pendidikan minimal setingkat SLTA.

Untuk tercapainya tujuan pemerataan pendidikan tersebut, pemerintah Kabupaten Wonosobo telah merancang draft keputusan Bupati Wonosobo tahun 2007 tentang Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat sampai dengan jenjang pendidikan setingkat SLTA, atau pada lembaga lain yang menyelenggarakan Program Kegiatan Pendidikan Luar Sekolah yang setara
- b. Meningkatkan akses dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan sampai dengan jenjang tingkat SLTA.
- c. Mengalokasikan anggaran bidang pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD, dimana sekurang-kurangnya 40% digunakan untuk biaya sekolah peserta didik dari keluarga miskin.
- d. Membebaskan biaya sekolah dan atau pungutan komite sekolah/madrasah bagi peserta didik dari keluarga miskin sampai dengan jenjang pendidikan setingkat SLTA

Dengan adanya draft keputusan Bupati ini maka perlu dikaji kebutuhan sekolah menengah yang ada di Kabupaten Wonosobo. Demikian juga dengan Kecamatan Kertek yang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar kedua sesudah Kecamatan Wonosobo.

Kecamatan Kertek sebagai bagian dari Kabupaten Wonosobo memiliki sarana pendidikan SD/MI sebanyak 43 dengan jumlah siswa sebanyak 9.393 siswa, SLTP/MTs sebanyak 5 dengan jumlah siswa sebanyak 2.453 siswa dan SLTA sebanyak 1 dengan jumlah siswa sebanyak 401 siswa. Jumlah lulusan SLTP 770 siswa tidak sebanding dengan daya tampung siswa baru di SMA yang hanya 200 siswa. Kondisi ini membuat banyak siswa tidak melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mencari alternatif sekolah SLTA di luar Kecamatan Kertek.

Dengan APK untuk tingkat sekolah menengah sebesar 9,42 serta APM sebesar 6,83 (profil pendidikan Kabupaten Wonosobo tahun 2008) jika dibandingkan dengan APK serta APM untuk tingkat kabupaten sebesar 32,75 dan 21,47 maka pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan pada sekolah menengah di Kecamatan Kertek ini relatif masih rendah. Apalagi jika harus mencapai angka ideal untuk APK dan APM yang mencapai 100 % (Usman, 2006).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan No 24 tahun 2007 tentang standar sarana prasarana sekolah menengah yang menyebutkan bahwa satu sekolah menengah dibangun untuk mencukupi 6.000 jiwa penduduk, maka dengan jumlah penduduk sebesar 77.509 jiwa dan penduduk usia sekolah menengah sebanyak 4.719 jiwa dengan hanya memiliki satu sekolah menengah yang berdaya tampung 480 siswa kebutuhan akan sekolah menengah dirasa sangat kurang karena belum bisa menjangkau seluruh wilayah Kecamatan Kertek.

TABEL I.1
SARANA PENDIDIKAN, KEPENDUDUKAN, ANGKA PARTISIPASI
KECAMATAN KERTEK TAHUN 2007

No	Uraian	Jumlah	
1.	Jenis sekolah	Jumlah	Jumlah Siswa
	SD	43	9.393
	SLTP	5	2.453
	SLTA	1	401
2	Angka Partisipasi	APK	APM
	Kecamatan Kertek	9,42	6,83
	Kabupaten Wonosobo	32,75	21,47
3	Kependudukan	Jumlah Penduduk	Penduduk 15-19 th
		77.509	4.719

Sumber:Kecamatan Kertek dalam angka tahun 2008 dan Profil pendidikan Wonosobo tahun 2008

Selain permasalahan kurangnya sekolah menengah, masalah lainnya adalah jenis sekolah menengah yang dibutuhkan. Dengan kondisi kemampuan ekonomi masyarakat yang beragam maka ada sebagian masyarakat yang hanya ingin menyekolahkan anaknya sampai lulus

sekolah menengah saja kemudian bisa langsung masuk dunia kerja. Atau ada sebagian lainnya yang ingin menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi. Jenis sekolah dimaksud bisa SMA atau SMK.

Dengan adanya beberapa faktor di atas, maka perlu adanya suatu ***”Studi kebutuhan sekolah menengah di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo”***.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, permasalahan di kawasan studi adalah banyaknya siswa yang tidak melanjutkan sekolah menengah hal ini bisa dilihat dari APK atau APM yang masih rendah, sarana pendidikan setingkat sekolah menengah yang belum sebanding dibandingkan jumlah lulusan SLTP, jenis sekolah menengah yang dibutuhkan, lokasi sekolah yang masih belum bisa menjangkau seluruh wilayah Kecamatan Kertek yang menyebabkan siswa bersekolah diluar wilayah Kecamatan Kertek, maka dapat ditarik sebuah pertanyaan yang dijadikan dasar dan acuan dalam penelitian ini, yaitu:

”Berapa kebutuhan, jenis serta dimana lokasi sekolah menengah di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo ?”

1.3. Tujuan, Sasaran Dan Manfaat Studi

1.3.1. Tujuan Studi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kebutuhan sekolah menengah, jenis serta lokasinya di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.

1.3.2. Sasaran Studi

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka sasaran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya kondisi sekolah menengah yang ada di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.
2. Teridentifikasinya jumlah kebutuhan sekolah menengah di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
3. Teridentifikasinya minat lulusan SLTP yang akan melanjutkan ke jenjang sekolah menengah.
4. Teridentifikasinya jenis sekolah menengah yang dibutuhkan di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
5. Teridentifikasinya lokasi sekolah menengah di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.

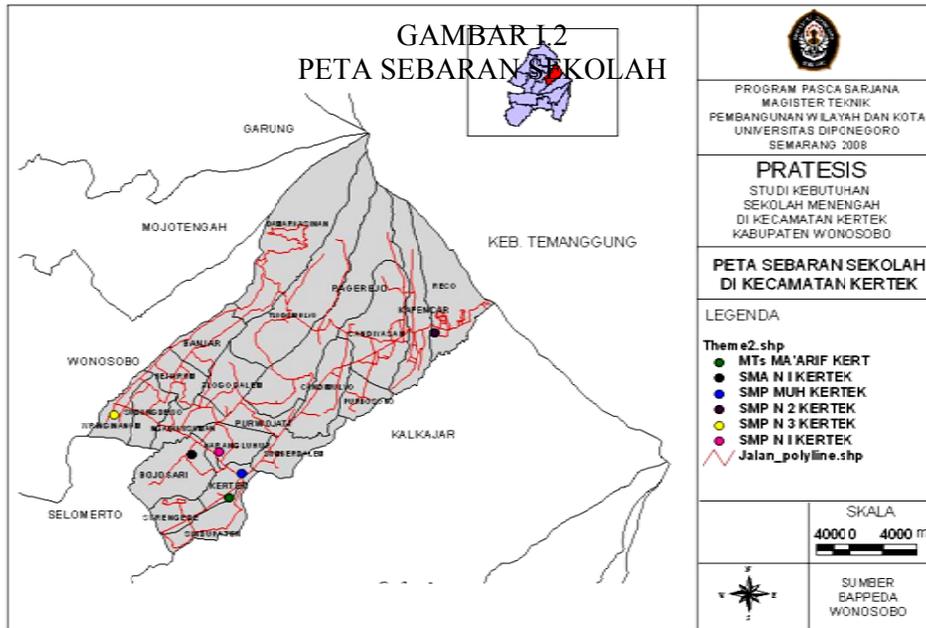
1.3.3. Manfaat Studi

Manfaat studi ini adalah sebagai masukan tentang pembangunan sekolah menengah di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo agar diperoleh hasil yang optimal yaitu bahwa sekolah menengah tersebut bisa mencukupi kebutuhan masyarakat akan pendidikan menengah, nyaman untuk proses pembelajaran serta mudah terjangkau.

1.4. Ruang Lingkup Studi

Ruang lingkup penelitian ini terdiri atas ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansial. Ruang lingkup wilayah berusaha membatasi wilayah studi/kajian agar didapatkan hasil sesuai dengan tujuan penelitian. Ruang lingkup

GAMBAR 1.2
PETA SEBARAN SEKOLAH



PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER TEKNIK
PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG 2008

PRATESIS

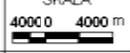
STUDI KEBUTUHAN
SEKOLAH MENENGAH
DI KECAMATAN KERTEK
KABUPATEN WONOSOBO

**PETA SEBARAN SEKOLAH
DI KECAMATAN KERTEK**

LEGENDA

- Thema2.shp
- MTs MA'ARIF KERTK
 - SMA N 1 KERTEK
 - SMP MUH KERTEK
 - SMP N 2 KERTEK
 - SMP N 3 KERTEK
 - SMP N 1 KERTEK
 - ∩ Jalan_polyline.shp

SKALA



SUMBER
BAPPEDA
WONOSOBO

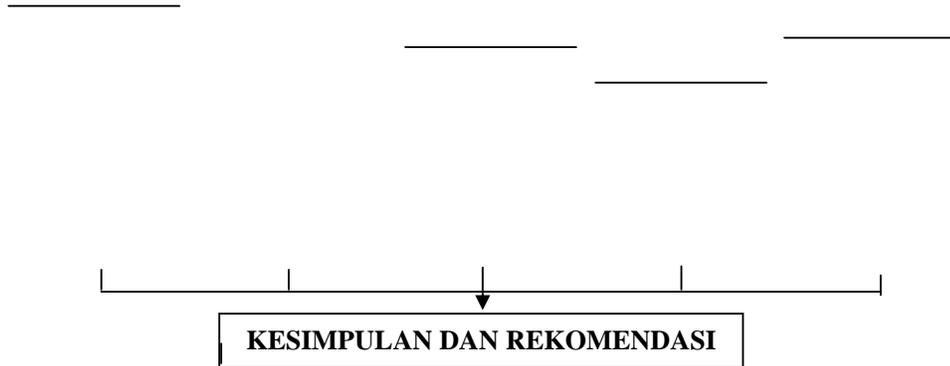
1.4.2. Ruang Lingkup Substansial

Untuk mencapai tujuan studi, ruang lingkup materi yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu kebutuhan sekolah menengah untuk pemenuhan pendidikan menengah tahun 2009. Pendidikan menengah hanya pendidikan menengah umum berbentuk sekolah menengah atas (SMA) dan pendidikan menengah kejuruan berbentuk sekolah menengah kejuruan (SMK).

Yang dimaksud dengan kebutuhan sekolah menengah pada studi ini adalah suatu bangunan beserta perlengkapannya yang diperlukan untuk proses belajar mengajar siswa sesudah menamatkan pendidikan dasar dikarenakan adanya perbedaan atau kesenjangan antara jumlah siswa dengan bangunan yang tersedia.

Ruang lingkup substansial pada studi ini meliputi:

1. Gambaran Umum jumlah sekolah menengah meliputi daya tampung, ketersediaan ruang kelas dan tingkat pelayan sekolah.
2. Analisis proyeksi kebutuhan sekolah menengah berdasarkan aspek normatif dan kebutuhan sekolah menengah berdasarkan jumlah penduduk usia sekolah



Sumber Hasil Analisis, 2009

GAMBAR 1.3
KERANGKA PIKIR

1.6. Pendekatan Studi

Di dalam studi ini akan digunakan pendekatan campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif mencakup semua jenis penelitian yang didasarkan atas perhitungan persentase, rata rata, chi kuadrat dan perhitungan lain. Atau dengan kata lain penelitian kuantitatif melibatkan pada perhitungan atau angka atau kuantitas (Moleong, 2007). Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis dengan tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya (Moleong, 2007).

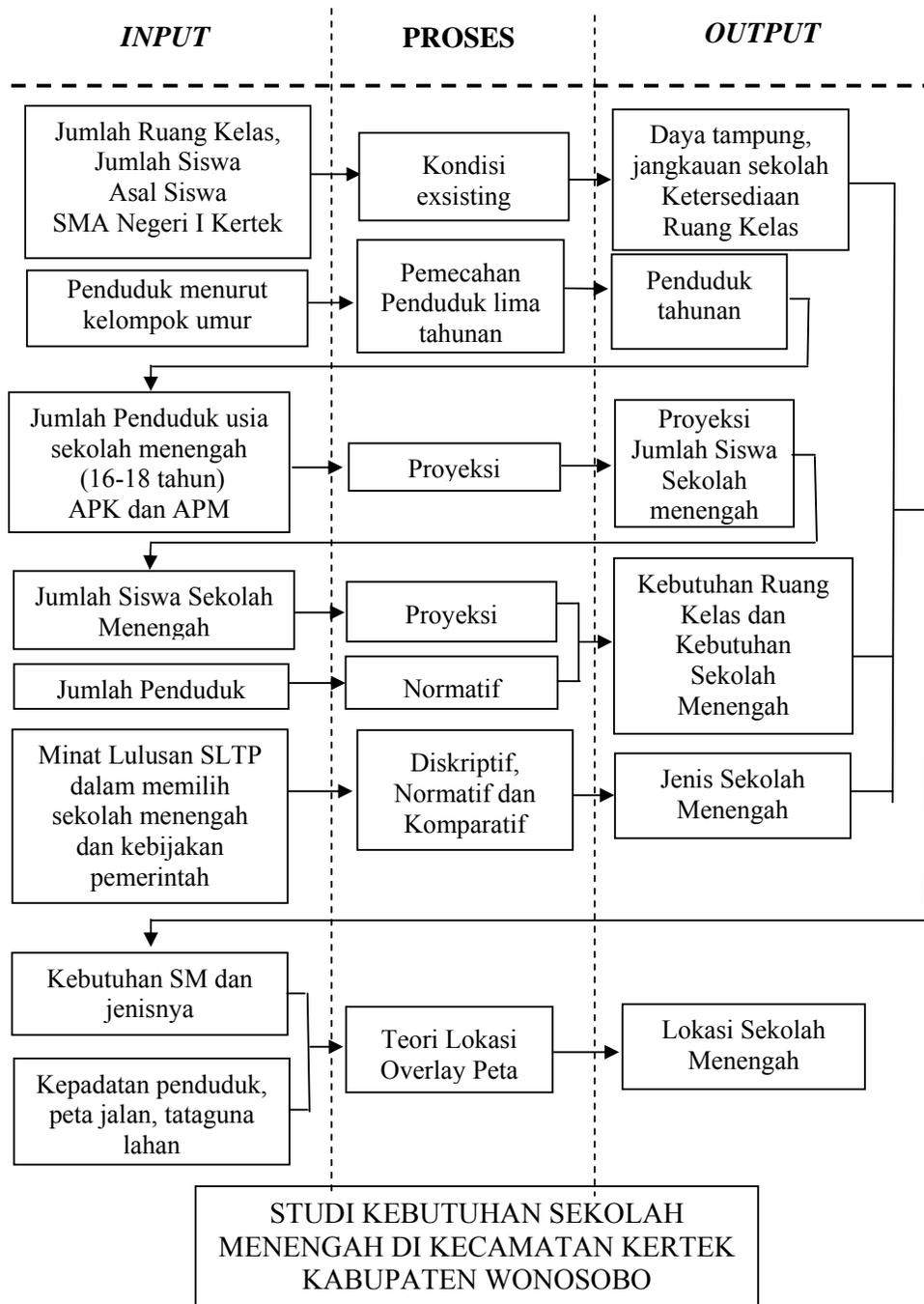
Pendekatan kualitatif dilakukan dengan melihat permasalahan yang diangkat merupakan permasalahan yang tidak bisa dijelaskan dan dianalisa melalui data-data statistik sehingga perlu pendekatan tertentu untuk memahaminya. Sedangkan pendekatan kuantitatif yang akan dilakukan merupakan pendekatan yang digunakan untuk perhitungan proyeksi penduduk usia sekolah, proyeksi siswa, serta kebutuhan ruang kelas dan sekolah menengah.

1.7. Metode Pelaksanaan Studi

Metode pelaksanaan studi adalah metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, berisi tentang kebutuhan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan penyajian data, teknik sampling, dan teknik analisis data.

1.7.1. Kerangka Analisis

Kerangka analisis yang dilakukan pada analisis kebutuhan sekolah menengah di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, dapat diuraikan berikut:



Sumber : Hasil Analisis,2009

GAMBAR 1.4.
DIAGRAM KERANGKA ANALISIS

Sesuai dengan kerangka analisis tentang kebutuhan sekolah menengah di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, langkah langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Analisis kondisi *existing*

Analisis ini bertujuan untuk melihat kondisi nyata sekolah menengah yang ada baik ketersediaan ruang kelas, daya tampung ataupun jangkauan sekolah dengan cara melihat data dan profil sekolah di SMA Negeri I Kertek Kabupaten Wonosobo.

b. Pemecahan penduduk lima tahunan

Pemecahan penduduk lima tahunan dilakukan karena penduduk menurut usia sekolah dengan data penduduk yang tersedia dari Badan Pusat Statistik (BPS) sering tidak cocok. Data pada BPS menggunakan interval 0-4 tahun, 5-9 tahun, 10-14 tahun, 15-19 tahun, 20-24 tahun dan seterusnya. Sedangkan usia untuk kebutuhan perencanaan pendidikan dengan interval 7-12 tahun, untuk Sekolah Dasar, 13-15 tahun untuk Sekolah Menengah Pertama, 16-18 tahun untuk Sekolah Menengah Atas dan 19-24 tahun untuk Perguruan Tinggi.

c. Proyeksi jumlah siswa sekolah menengah

Proyeksi jumlah siswa sekolah menengah dilakukan dengan menggunakan patokan rata rata APK dengan APM tingkat kabupaten yang dikalikan dengan jumlah penduduk usia sekolah di Kecamatan Kertek.

d. Analisis kebutuhan ruang kelas dan kebutuhan sekolah

- . Proyeksi kebutuhan ruang kelas dilakukan untuk melihat kebutuhan ruang kelas berdasarkan jumlah siswa usia sekolah yang ada.

- . Normatif

Analisis kebutuhan ruang kelas dan kebutuhan sekolah berdasarkan aspek normatif atau kebijakan dilakukan dengan melihat kebutuhan ruang kelas berdasarkan Permendiknas No 24 Tahun 2007 tentang standar sarana prasarana sekolah menengah, standar nasional Indonesia no 03-1733-2004, Pedoman Standar Pelayanan Minimal Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah no 534/KPTS/M/2001.

e. Analisis penentuan jenis sekolah menengah

Analisis jenis sekolah menengah dilakukan untuk menentukan jenis sekolah menengah yaitu SMA atau SMK. Analisis ini dilakukan dengan cara diskriptif dari minat lulusan SLTP yang akan melanjutkan ke sekolah menengah, selain itu juga dilakukan dengan kajian normatif kebijakan pemerintah tentang jenis sekolah yang direncanakan akan dibangun.

f. Analisis penentuan lokasi sekolah

Analisis penentuan lokasi sekolah dilakukan untuk menentukan lokasi sekolah yang akan dibangun agar mudah diakses, aman, nyaman dan mendukung proses belajar mengajar. Analisis ini meliputi aksesibilitas yaitu bahwa lokasi sekolah harus terletak dekat jalan raya, berada pada kepadatan dan jumlah penduduk usia sekolah menengah yang tinggi, berada diluar jangkauan sekolah menengah yang ada dimaksudkan untuk pemerataan serta berada pada lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan seperti ladang,

kebun atau belukar yang dimaksudkan untuk pemanfaatan lahan semaksimal mungkin.

1.7.2. Data Yang Digunakan

Untuk memenuhi kebutuhan data dalam penelitian, dilakukan pengumpulan data terhadap objek yang akan diteliti dalam rangka mendapatkan gambaran mengenai suatu keadaan permasalahan di kawasan penelitian, data dimaksud ini terdiri dari :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. (Marzuki, 2002).

Data Primer akan diambil dengan menggunakan metode kuesioner dari siswa SLTP Kecamatan Kertek tahun pelajaran 2008-2009 .

b. Data Sekunder

Data Sekunder Merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan maupun publikasi lainnya serta laporan-laporan (Marzuki, 2002).

Data sekunder diperoleh dari buku laporan, referensi dan informasi yang didokumentasikan oleh kantor/dinas/instansi terkait, diantaranya berupa data kabupaten dalam angka, kecamatan dalam angka dan profil pendidikan.

TABEL I.2
DATA YANG DIGUNAKAN

No.	Sasaran	Analisis	Kebutuhan Data	Jenis Data	Sumber Data	Tahun
1	Tergambarnya kondisi sekolah menengah yang ada.	Kondisi existing	Profil Sekolah -. Daya Tampung -. Jumlah siswa -.Jangkauan Sekolah	Sekunder	SMA Negeri I Kertek	2008
2	Diketahui jumlah kebutuhan sekolah menengah	Proyeksi	Jumlah Penduduk menurut kelompok umur APK dan APM	Sekunder	Wonosobo dalam angka Kecamatan Kertek dalam angka Profil pendidikan	2007
3	Teridentifikasinya minat lulusan SLTP yang akan melanjutkan ke jenjang sekolah menengah	Diskriptif	Minat siswa	Primer	Siswa kelas VIII SLTP di Kecamatan Kertek	2009

lanjutan

No.	Sasaran	Analisis	Kebutuhan Data	Jenis Data	Sumber Data	Tahun
4	Ditentukannya jenis sekolah menengah	Disikriptif Normatif Komparatif	Minat siswa SLTP dalam memilih sekolah menengah	Primer	Siswa kelas VIII SLTP di Kec. Kertek	2009
			Kebijakan pemerintah	Sekunder	Renstra Depdiknas	2005-2009
5	Ditentukannya lokasi Sekolah Menengah	Teori Lokasi	Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Sebaran Sekolah Jaringan jalan Tataguna lahan	Sekunder	Wonosobo dalam angka Kecamatan Kertek dalam angka Profil pendidikan RTRW	2007

Sumber : Hasil Analisis, 2009

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian (Gulo, 2002)

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan secara langsung kepada objek penelitian. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner. Dengan metode kuesioner, informasi diperoleh melalui permintaan keterangan-keterangan kepada pihak yang memberikan keterangan atau jawaban (responden). Kuesioner adalah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal hal yang ia ketahui. (Arikunto, 2006) .

Datanya berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Disebut juga *questionnaire methode*, karena untuk memperoleh data biasanya diajukan serentetan pertanyaan-pertanyaan yang tersusun dalam satu daftar (Marzuki, 2002).

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan peneliti dengan melalui penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek studi. Dokumen-dokumen tersebut berasal dari biro statistik, kebijakan dan laporan-laporan.

1.7.4. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi atau pengamatan yang dilakukan masih merupakan data mentah. Agar data tersebut dapat

digunakan untuk penelitian, maka perlu suatu pengolahan dan penyajian data. Tahap-tahap yang akan dilakukan dalam teknik pengolahan dan penyajian data ini adalah sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap data yang masuk, apakah terdapat kekeliruan dalam pengisian atau kurang lengkap, palsu, tidak sesuai dan sebagainya. Editing dilakukan dengan harapan akan diperoleh data yang benar-benar valid dan reliable serta dapat dipertanggungjawabkan.

b. *Coding*

Coding merupakan proses pemberian tanda, simbol ataupun kode pada setiap yang masuk dalam kelompok yang sama. Tanda tersebut dapat berupa angka atau huruf.

c. *Tabulating*

Tabulating yang merupakan tahap memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya. Penyajian data dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tabel silang, gambar, dan grafik. Sedangkan untuk data sekunder tidak diperlukan lagi pengolahan lebih lanjut, karena data tersebut telah disajikan secara sistematis dan untuk penyajiannya disesuaikan dengan analisis yang dilakukan.

1.7.5. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel (Sugiyono, 2005). Karena besarnya jumlah responden, keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, faktor ekonomis, maka penelitian akan dilakukan terhadap sejumlah sampel yang diambil dari beberapa kelompok populasi yang mewakili.

Populasi responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX SLTP se Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo tahun pelajaran 2008 - 2009. Seluruh populasi mempunyai hak yang sama untuk dijadikan sampel penelitian atau disebut probability sampling (Sugiyono, 2005). Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan teknik

simple random sampling karena pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi (Sugiyono, 2005).

Pengambilan sampel kelas IX dilakukan karena siswa pada kelas tersebut akan segera memasuki sekolah menengah setelah lulus SLTP. Siswa kelas IX ini diharapkan telah mempunyai gambaran yang cukup tentang kelanjutan sekolahnya setelah lulus SLTP.

TABEL I.3
JUMLAH SISWA SLTP SE KECAMATAN KERTEK
TAHUN PELAJARAN 2008–2009

NO	SEKOLAH	KELAS VII	KELAS VIII	KELAS IX	JUMLAH
1	SMP N 1 KERTEK	252	238	256	746
2	SMP N 2 KERTEK	288	193	171	652
3	SMP N 3 KERTEK	180	158	162	500
4	SMP MUH. KERTEK	100	80	74	254
5	MTs MA'ARIF KERTEK	148	135	144	427
JUMLAH		968	804	807	

Sumber: Profil SLTP se- Kecamatan Kertek tahun 2008

Pengambilan sampel didasarkan pada tabel Krecjie pada taraf kesalahan 5%. Jadi sampel yang diperoleh mempunyai kepercayaan 95%. Tabel Krecjie dapat dilihat pada Tabel IV.3 berikut :

TABEL I.4
TABEL KRECJIE UNTUK PERHITUNGAN SAMPEL
DENGAN TARAF SIGNIFIKASI 5%

N	S	N	S	N	S
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351

90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	100000	384

Sumber: Sugiyono, 2005. *Statistika untuk Penelitian*

Karena jumlah populasi sebanyak 807 siswa maka sampel yang diambil berdasarkan tabel Krecjie adalah sejumlah 260 siswa kelas IX,. Sampel sebanyak 260 siswa tersebut akan terdistribusi berdasarkan prosentase pada jumlah siswa kelas IX dari masing masing SLTP. Pembagian sampel tersebut adalah sebagai berikut:

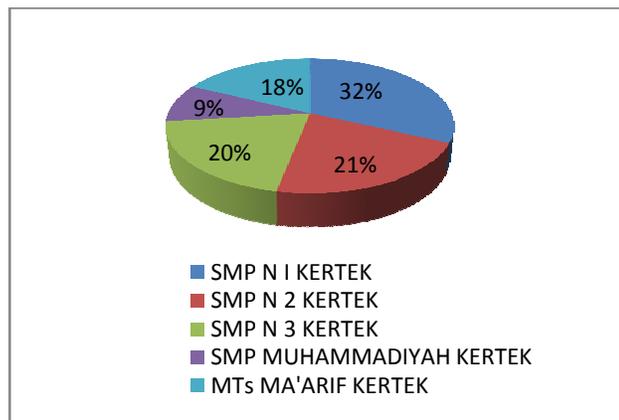
$$SMP N 1 Kertek = \frac{256}{807} \times 260 \approx 82,47 = 83$$

$$SMP N 2 Kertek = \frac{171}{807} \times 260 \approx 55,09 = 55$$

$$SMP N 3 Kertek = \frac{162}{807} \times 260 \approx 52,19 = 52$$

$$SMP Muhammadiyah Kertek = \frac{74}{807} \times 260 \approx 23,84 = 24$$

$$MTS Ma'arif Kertek = \frac{144}{807} \times 260 \approx 46,39 = 46$$



Sumber: Hasil Analisis, 2009

GAMBAR 1.5
GRAFIK PROSENTASE SAMPEL

1.7.6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain (Bogdan dan Biklen dalam Moleong 2007).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif merupakan jenis analisis yang menjelaskan suatu masalah/keadaan bukan dalam besaran angka/nilai, namun berbentuk uraian, tanggapan kritis, perbandingan/komparasi.

Jenis analisis kualitatif dibedakan menjadi:

- Deskriptif

Diskriptif yaitu menganalisis keadaan objek studi melalui uraian, pengertian ataupun penjelasan-penjelasan baik terhadap analisis yang bersifat terukur maupun tidak terukur.

- **Normatif**

Normatif yaitu analisis terhadap keadaan yang seharusnya mengikuti suatu aturan atau pedoman ideal tertentu maupun landasan hukum atau lainnya.

- **Komparatif**

Komparatif yaitu menganalisis kondisi objek studi melalui uraian dan penjelasan yang membandingkan antara satu dengan lainnya.

b. **Analisis Kuantitatif**

Analisis kuantitatif merupakan analisis yang berhubungan dengan angka, bobot, nilai, jumlah dari suatu topik/bahasan. Analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung besarnya kebutuhan sekolah menengah berdasarkan jumlah penduduk, penduduk usia sekolah serta APK dan APM untuk sekolah menengah. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode proyeksi, dengan menghitung proyeksi jumlah penduduk usia sekolah, APK, APM serta perhitungan kebutuhan ruang kelas dan kebutuhan sekolah menengah.

1.8. Kerangka Penulisan Hasil Studi

Rencana kerangka penulisan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang studi, permasalahan dan rumusan masalah, tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat studi, ruang lingkup substansial dan spasial, kerangka pemikiran, teknik *sampling*, serta metode dan pendekatan studi.

Bab II KAJIAN LITERATUR TENTANG KEBUTUHAN SEKOLAH MENENGAH

Menjelaskan tentang kajian pustaka yang relevan untuk mengkaji materi kebutuhan sekolah menengah, proyeksi sekolah menengah, jenis sekolah menengah dan kebijakan-kebijakan pemerintah serta lokasi sekolah menengah.

Bab III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Menjelaskan data dan informasi tentang Kabupaten Wonosobo sebagai wilayah studi makro dan Kecamatan Kertek sebagai wilayah studi mikro.

Bab IV ANALISA KEBUTUHAN SEKOLAH MENENGAH

Berisikan analisis secara sistematis mengenai kondisi sekolah menengah yang ada, analisa penduduk usia sekolah menengah dan proyeksi siswa, analisa kebutuhan ruang kelas dan sekolah menengah, analisa jenis sekolah menengah, serta penentuan lokasi sekolah menengah.

Bab V PENUTUP

Berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil temuan serta rekomendasi yang diusulkan berdasarkan kesimpulan tersebut.

BAB II

KAJIAN KEBUTUHAN SEKOLAH MENENGAH

2.1. Tinjauan Tentang Kebutuhan Sekolah Menengah

2.1.1. Kebutuhan

Kebutuhan berasal dari kata dasar “butuh” yang didefinisikan sebagai hal yang dibutuhkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001). Kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia sehingga dapat mencapai kesejahteraan, bila ada diantara kebutuhan tersebut yang tidak terpenuhi maka manusia akan merasa tidak sejahtera atau kurang sejahtera. Dapat dikatakan bahwa kebutuhan adalah suatu hal yang harus ada, karena tanpa itu hidup kita menjadi tidak sejahtera atau setidaknya kurang sejahtera. Kebutuhan juga diartikan tidak adanya sesuatu atau ada kesenjangan antara apa yang sedang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan manusia karena adanya kesenjangan atau perbedaan antara apa yang sedang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi agar dicapai suatu kesejahteraan. Atau dengan kata lain adanya suatu kesenjangan antara permintaan dengan penyediaan .

2.1.2. Sekolah Menengah

Untuk mendefinisikan sekolah menengah kita bisa lihat dari Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 18, yang

menyatakan, “Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan”. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat .

Sekolah adalah suatu bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001). Bangunan sekolah berupa ruang kelas, tempat praktik, laboratorium, perpustakaan serta sarana lain untuk menunjang proses belajar mengajar antara siswa dan guru.

Jadi sekolah menengah adalah suatu bangunan beserta perlengkapannya untuk proses belajar mengajar siswa sesudah siswa tersebut menamatkan pendidikan dasar. Sekolah menengah ini berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

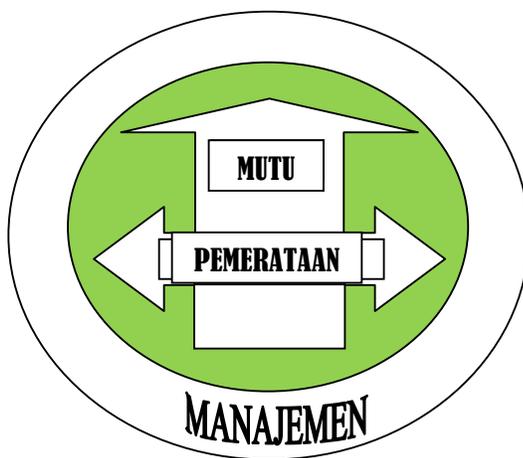
2.1.3. Kebutuhan Sekolah Menengah

Dari arti kata kebutuhan dan sekolah menengah dapat digabungkan definisi kebutuhan sekolah menengah adalah suatu bangunan beserta perlengkapannya yang diperlukan untuk proses belajar mengajar siswa sesudah menamatkan pendidikan dasar dikarenakan adanya perbedaan atau kesenjangan antara jumlah siswa dengan bangunan yang tersedia.

2.1.4. Kebutuhan Sekolah Menengah Dalam Isu Strategis Pendidikan

Pendidikan menurut UU No 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan.

Untuk dapat dicapainya tujuan pendidikan nasional tersebut kiranya perlu disusun suatu strategi yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia. Isu strategis pendidikan adalah masalah-masalah pendidikan yang harus menjadi perhatian. Isu strategis pendidikan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pemerataan, mutu dan manajemen (Nugroho, 2008).



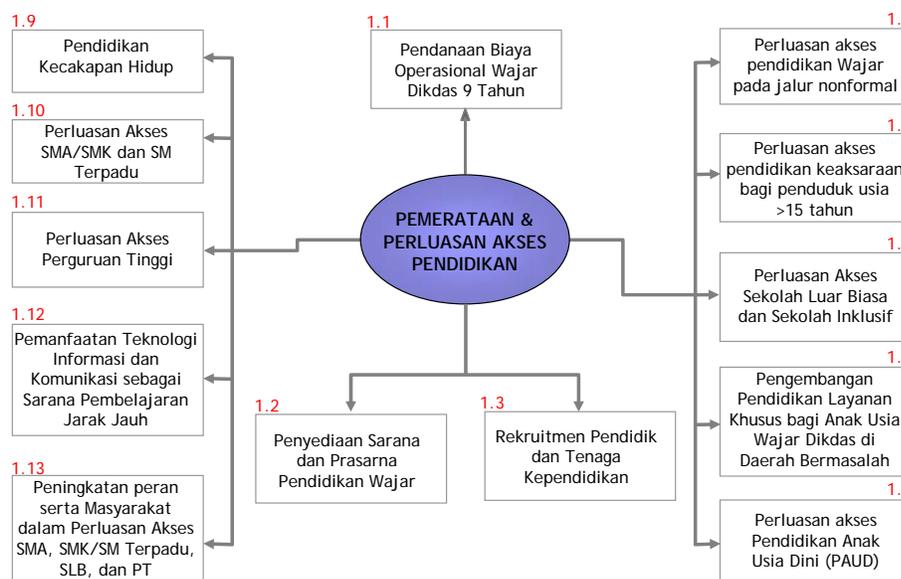
Sumber : Nugroho, 2005 Pendidikan Indonesia : Harapan, Visi dan Strategi

GAMBAR 2.1
ISU STRATEGIS PENDIDIKAN

Pemerataan pendidikan berkenaan dengan seberapa luas pendidikan telah menjangkau seluruh warga negara. Mutu pendidikan berkenaan dengan seberapa mendalam pendidikan telah memberikan nilai tambah pada para peserta didik. Sedangkan manajemen berkenaan dengan pengelolaan institusi pendidikan sehingga mencapai tujuan kelembagaan.

Indikator pemerataan pendidikan dapat dilihat dari jumlah sekolah perpenduduk usia sekolah, jumlah guru, jumlah siswa persekolah, jumlah putus sekolah serta jumlah buta huruf (Nugroho, 2008).

Dalam penyelesaian isu strategis pendidikan ini pemerintah telah memberikan kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan seperti gambar berikut:



Sumber : Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009

GAMBAR 2.2
KEBIJAKAN DALAM PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES
PENDIDIKAN

Perluasan akses SMA dan SMK seperti dalam kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan salah satunya dilaksanakan dengan pembangunan serta penambahan sekolah menengah.

2.2. Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan

Untuk lebih memudahkan pencapaian tujuan nasional pendidikan berdasarkan UU no 20 tahun 2003 ditentukan jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai berikut:

2.2.1. Jalur pendidikan

Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan meliputi pendidikan formal, non formal dan pendidikan informal.

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 14 disebutkan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pendidikan nonformal seperti yang tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003 pasal 26 diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan

pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan tersebut diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

2.2.2. Jenjang pendidikan

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan ini meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- b. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau

bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

- c. Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- d. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.

2.2.3. Jenis pendidikan

Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

- a. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bentuknya:

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

- b. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Bentuk satuan pendidikannya adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- c. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
- d. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki suatu profesi atau menjadi seorang profesional.
- e. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal dalam jenjang diploma 4 setara dengan program sarjana (S1).
- f. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- g. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah

biasa) atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah (dalam bentuk Sekolah Luar Biasa/SLB).

2.3. Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan

Untuk mencapai tujuan nasional pendidikan pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dijadikan dasar serta acuan dalam pengembangan pendidikan, kebijakan-kebijakan itu antara lain:

2.3.1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2008 tentang wajib belajar disebutkan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun non-formal, sehingga seluruh anak usia sekolah (7–15 tahun) dapat memperoleh pendidikan.

2.3.2. Program Pendidikan Menengah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi penduduk yang mencakup SMA, SMK, MA, MAK dan Paket C. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk pembangunan USB,RKB, laboratorium terpadu.
- b. Rehabilitasi fisik gedung.
- c. Penataan bidang keahlian pada pendidikan menengah kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja.
- d. Penyediaan materi pendidikan, media pengajaran dan teknologi pendidikan termasuk peralatan peraga pendidikan, buku pelajaran, buku bacaan dan buku ilmu pengetahuan dan teknologi serta materi pelajaran yang berbasis teknologi informasi.
- e. Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan menengah baik formal maupun non formal.
- f. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik dengan memberi perhatian pada anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- g. Penerapan manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang memberi wewenang dan tanggung jawab pada satuan pendidikan.
- h. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan, dan pengelolaan pembangunan pendidikan menengah.
- i. Penyiapan pelaksanaan Program Pendidikan 12 Tahun
- j. Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan menengah.

2.3.3. Standar Sarana Prasarana Sekolah Menengah Atas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan no 24 tahun 2007 dan Standar Sarana Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan no 40 tahun 2008.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan maka dikeluarkan Peraturan menteri mengenai standar sarana prasarana sekolah menengah. Peraturan Menteri ini untuk memberikan standar tentang sarana prasarana sekolah menengah baik berupa lokasi sekolah, jangkauan, serta sarana pendukung lainnya. Peraturan Menteri Pendidikan no 24 tahun 2007 menekankan standar sarana prasarana Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, sedangkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 40 tahun 2008 menekankan pada standar sarana prasarana Sekolah Menengah Kejuruan. Kedua Peraturan Menteri itu didalamnya antar lain memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Satu SMA/MA memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. Satu SMK/MAK memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 48 rombongan belajar.
- b. Satu SMA/MA dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 6000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 6000 jiwa dapat dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada atau pembangunan SMA/MA baru.
- c. Lahan untuk satuan pendidikan SMA/MA memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel II.1 berikut:

TABEL II.1
RASIO MINIMUM LUAS LANTAI BANGUNAN
TERHADAP PESERTA DIDIK (M²/PESERTA DIDIK)

No	Banyak Rombongan Belajar	Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik (m ² /peserta didik)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	10,9		
2	4-6	6,8	7,3	
3	7-9	5,5	5,8	6,0
4	10-12	4,9	5,2	5,4
5	13-15	4,5	4,7	4,9
6	16-18	4,2	4,5	4,6
7	19-21	4,1	4,3	4,4
8	22-24	3,9	4,2	4,3
9	25-27	3,9	4,1	4,1

Sumber: Permendiknas 24 tahun 2007

- d. Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lahan juga memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel II.2 berikut:

TABEL II.2
LUAS MINIMUM LANTAI BANGUNAN

No	Banyak Rombongan Belajar	Luas minimum lantai bangunan (m ²)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	3	650	-	-
2	4-6	770	840	-
3	7-9	920	990	1020
4	10-12	1080	1150	1180
5	13-15	1220	1310	1360
6	16-18	1350	1450	1500
7	19-21	1530	1630	1680
8	22-24	1700	1830	1890
9	25-27	1870	2000	2060

Sumber: Permendiknas 40 tahun 2008

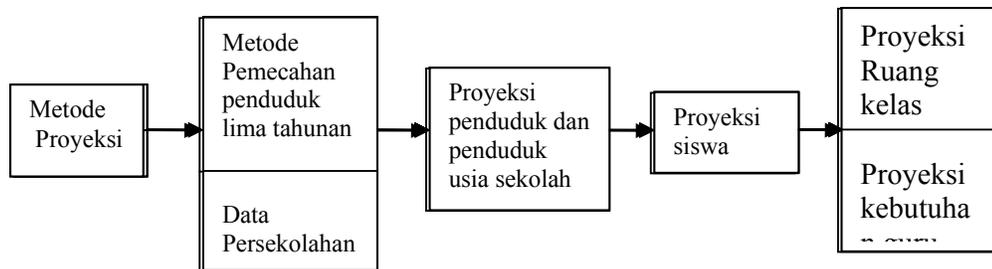
- e. Luas lahan yang dimaksud di atas adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah .
- f. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- g. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
- h. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut.
 - Pencemaran air, sesuai dengan PP RI No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
 - Kebisingan, sesuai dengan Kepmen Negara KLH nomor 94/MENKLH/1992 tentang Baku Mutu Kebisingan.
 - Pencemaran udara, sesuai dengan Kepmen Negara KLH Nomor 02/MEN KLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.
- i. Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.
- j. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.
- k. Kapasitas maksimum ruang kelas 32 siswa

2.4. Proyeksi Kebutuhan Sekolah Menengah

Dalam suatu proses perencanaan pendidikan, proyeksi kebutuhan sekolah menengah merupakan suatu tahap mempersiapkan kegiatan dimasa depan dalam bidang pembangunan sekolah. Proyeksi ini sangatlah penting agar apa yang akan dibutuhkan bisa dibuat secara tepat sesuai kondisi yang mendekati sebenarnya.

Perencanaan pendidikan dengan metode proyeksi akan menghasilkan metode pemecahan penduduk lima tahunan, data persekolahan, proyeksi penduduk dan penduduk usia sekolah, proyeksi siswa, proyeksi ruang kelas serta proyeksi kebutuhan guru (Usman, 2006).

Keterkaitan antara model proyeksi dengan hasil yang diperoleh seperti terlihat pada gambar berikut :



Sumber: Usman , 2006

GAMBAR 2.3
KETERKAITAN ANTARA MODEL PROYEKSI
DENGAN HASIL YANG DIPEROLEH

2.4.1. Pemecahan penduduk lima tahunan menjadi tahunan

Pemecahan penduduk lima tahunan menjadi usia tahunan diperlukan dalam perencanaan pendidikan karena penduduk menurut usia sekolah dengan

data penduduk yang tersedia dari Badan Pusat Statistik (BPS) sering tidak cocok. Data pada BPS menggunakan interval 0-4 tahun, 5-9 tahun, 10-14 tahun, 15-19 tahun, 20-24 tahun dan seterusnya. Sedangkan usia untuk kebutuhan perencanaan pendidikan dengan interval 7-12 tahun, untuk Sekolah Dasar , 13-15 tahun untuk Sekolah Menengah Pertama, 16-18 tahun untuk Sekolah Menengah Atas dan 19-24 tahun untuk Perguruan Tinggi (Usman, 2006)

Salah satu cara yang digunakan untuk memecah penduduk lima tahunan menjadi penduduk tahunan adalah dengan menggunakan metode *Spraque Multiplier*. Metode ini didasarkan pada tabel bilangan pengali Spraque seperti tabel II.3 berikut:

TABEL II.3
BILANGAN PENGALI SPRAQUE

Tabel	Usia	F-3	F-2	F-1	F0	F1	F2	F3
0-4 tahun	Fa	-	-	-	0.3616	-0.2768	0.1488	-0.0336
	Fb	-	-	-	0.2640	-0.0960	0.0400	-0.0080
	Fc	-	-	-	0.1840	0.0400	-0.0320	0.0080
	Fd	-	-	-	0.1200	0.1360	-0.0720	0.0160
	Fe	-	-	-	0.0704	0.1968	-0.0848	0.1760
5-9 tahun	Fa	-	-	0.0036	0.2272	-0.0752	0.0144	-
	Fb	-	-	0.0080	0.2820	-0.0480	0.0080	-
	Fc	-	-	-0.0800	0.2160	-0.0080	0.0000	-
	Fd	-	-	-0.0160	0.1840	0.0400	-0.0080	-
	Fe	-	-	-0.0176	0.1408	0.0912	-0.0144	-
10-14 tahun s.d 70-74 tahun	Fa	-	-0.0128	0.0848	0.1504	-0.0240	0.0016	-
	Fb	-	-0.0016	0.0144	0.2224	-0.0416	0.0064	-
	Fc	-	0.0064	-0.0336	0.2544	-0.0336	0.0064	-
	Fd	-	0.0004	-0.0416	0.2224	0.0144	-0.0016	-
	Fe	-	0.0016	-0.0240	0.1504	0.0848	-0.0128	-

lanjutan

Tabel	Usia	F-3	F-2	F-1	F0	F1	F2	F3
75-79 tahun	Fa	-	-0.0144	0.0912	0.1408	-0.0176	-	-
	Fb	-	-0.0080	0,0400	0.1840	-0.0160	-	-
	Fc	-	0.0000	-0.0080	0.2160	-0.0080	-	-
	Fd	-	0.0080	-0.0480	0.2320	0.0080	-	-
	Fe	-	0.0144	-0.0752	0.2272	0.0336	-	-
80-84 tahun	Fa	0.0176	-0.0848	0.1968	0,0704	-	-	-
	Fb	0.0160	-0.0720	0.1360	0.1200	-	-	-
	Fc	0.0080	-0.0320	0.0400	0.1840	-	-	-
	Fd	-0.0800	0.0400	-0.0960	0.2640	-	-	-
	Fe	-0.0336	0.1488	-0.2768	0.3616	-	-	-

Sumber: Usman, 2006. *Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*

- Tabel 1 Untuk menghitung kelompok usia 0-4 tahun selain usia 0-4 perlu juga diketahui kelompok usia 5-9 tahun, 10-14 tahun dan 15-19 tahun
- Tabel 2 Untuk menghitung kelompok usia 5-9 tahun selain 5-9 tahun perlu juga diketahui kelompok usia 0-4 tahun, 10-14 tahun dan 15-19 tahun
- Tabel 3 Untuk menghitung kelompok usia 10-14 tahun sampai 70-74 tahun selain diketahui usia yang dihitung juga perlu diketahui dua kelompok sebelumnya dan dua kelompok sesudahnya.
- Tabel 4 Untuk menghitung kelompok usia 75-79 tahun selain usia 75-79 tahun perlu juga diketahui kelompok usia 65-69 tahun, 70-74 tahun dan 80-84 tahun
- Tabel 5 Untuk menghitung kelompok usia 80-84 tahun selain usia 80-84 tahun perlu juga diketahui kelompok usia 65-69 tahun, 70-74 tahun, 75-79 tahun .

Rumus yang dipakai untuk masing masing tabel adalah sebagai berikut:

Rumus I untuk 0-4 tahun

$$Fa = (S1a \times F_0) + (S2a \times F_1) + (S3a \times F_2) + (S4a \times F_3) \dots\dots\dots (1)$$

Rumus II untuk 5-9 tahun

$$F_a = (S1a \times F_{-1}) + (S2a \times F_0) + (S3a \times F_1) + (S4a \times F_2) \dots\dots\dots (2)$$

Rumus III untuk semua usia kecuali 0-4 tahun, 5-9 tahun 75-79 tahun dan 80-84 tahun

$$F_a = (S1a \times F_{-2}) + (S2a \times F_{-1}) + (S3a \times F_0) + (S4a \times F_1) + (S5a \times F_2) \dots\dots\dots(3)$$

Rumus IV untuk 75-79 tahun

$$F_a = (S1a \times F_{-2}) + (S2a \times F_{-1}) + (S3a \times F_0) + (S4a \times F_1) \dots\dots\dots(4)$$

Rumus V untuk 80-84 tahun

$$F_a = (S1a \times F_{-3}) + (S2a \times F_{-2}) + (S3a \times F_{-1}) + (S4a \times F_0) \dots\dots\dots (5)$$

Keterangan :

F_a	=	Penduduk menurut usia tahunan yang pertama
F_0	=	Penduduk kelompok usia yang akan dipecah
F_{-1}	=	Penduduk kelompok usia sebelumnya yang pertama sebelum F_0
F_{-2}	=	Penduduk kelompok usia sebelumnya yang kedua sebelum F_0
F_{-3}	=	Penduduk kelompok usia sebelumnya yang ketiga sebelum F_0
F_1	=	Penduduk kelompok usia berikut yang pertama sesudah F_0
F_2	=	Penduduk kelompok usia berikut yang kedua sesudah F_0
F_3	=	Penduduk kelompok usia berikut yang ketiga sesudah F_0
$S1a$	=	Bilangan pengali Spraque pertama untuk usia a tahun
$S2a$	=	Bilangan pengali Spraque kedua untuk usia a tahun
$S3a$	=	Bilangan pengali Spraque ketiga untuk usia a tahun
$S4a$	=	Bilangan pengali Spraque keempat untuk usia a tahun
$S5a$	=	Bilangan pengali Spraque kelima untuk usia a tahun

2.4.2. Angka Pertumbuhan Siswa

Angka pertumbuhan siswa adalah kenaikan jumlah siswa tiap tahunnya.

Angka pertumbuhan siswa ini bisa dicari dengan menggunakan rumus :

$$AP_n = \frac{S_{n-1} - S_{n-2}}{S_{n-2}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (6)$$

Keterangan :

- AP_n = Angka pertumbuhan siswa tahun ke - n
 S_{n-1} = Siswa tahun ke n - 1
 S_{n-2} = Siswa tahun ke n - 2

2.4.3. Proyeksi penduduk usia sekolah

- a. Proyeksi penduduk usia sekolah menggunakan angka pertumbuhan.

Proyeksi penduduk usia sekolah adalah suatu prediksi penduduk usia sekolah pada suatu saat tertentu jika diketahui jumlah penduduk usia sekolah tersebut pada dua tahun sebelumnya.

Rumus yang digunakan adalah:

$$PUS_n = PUS_{n-1} \times \left\{ 1 + \left(\frac{APPUS_{n-1}}{100} \right) \right\} \quad \dots\dots\dots (7)$$

Keterangan :

- PUS_n = Proyeksi penduduk usia sekolah tahun ke - n
 PUS_{n-1} = Penduduk usia sekolah tahun ke n - 1
 $APPUS_{n-1}$ = Angka pertumbuhan penduduk usia sekolah tahun ke n-1 sampai ke n - 2

b. Proyeksi penduduk usia sekolah menggunakan arus siswa

Proyeksi siswa dengan menggunakan arus siswa dengan didasarkan tiga asumsi yaitu:

- Berdasarkan kebijakan berarti bahwa proyeksi ini menggunakan target yang telah ditentukan. Target yang ditentukan misalnya adalah APK sampai pada 10 tahun ke depan meningkat 12,5% , artinya bahwa APK tiap tahun rata rata naik 1,25%
- Tanpa kebijakan berarti proyeksi ini menggunakan kecenderungan dan konstan. Kecenderungan bisa diamati pada beberapa tahun terakhir bisa naik, turun ataupun tetap. Sedangkan jika parameter yang digunakan sama dengan tahun terakhir, maka proyeksi ini dikatakan konstan.
- Gabungan dari kebijakan dan tanpa kebijakan artinya bahwa proyeksi ini menggunakan gabungan antara target, kecenderungan dan konstan.

2.4.4. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

a. Angka partisipasi kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah murid pada suatu satuan pendidikan terhadap jumlah penduduk usia yang berkaitan (Nugroho, 2008)

$$APK = \frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk usia kelompok tertentu}} \times 100\%$$

Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Nilai APK dapat >100% karena adanya siswa yang berusia di luar usia resmi sekolah (Usman, 2006).

b. Angka partisipasi murni (APM)

Angka Partisipasi Murni adalah persentase jumlah murid pada usia sekolah tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada suatu satuan pendidikan (Nugroho, 2008)

$$APM = \frac{\text{Jml siswa usia sekolah di jenjang pend tertentu}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah}} \times 100\%$$

Semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang sekolah di suatu daerah tertentu. Nilai ideal APM adalah 100%, jika $APM > 100\%$ karena adanya siswa dari luar daerah yang berada pada sekolah di daerah tersebut (Usman, 2006).

2.4.5. Proyeksi kebutuhan ruang kelas

Dalam perencanaan pendidikan, kebutuhan tambahan ruang kelas baru (RKB) dan tambahan unit sekolah baru (USB) sangat diperlukan terutama dalam rangka perluasan kesempatan belajar. Metode proyeksi yang bisa digunakan adalah dengan metode makro dan metode mikro (Usman, 2006).

Pendekatan makro adalah metode yang hanya menggunakan jumlah siswa usia sekolah. Pendekatan ini lebih mudah dilaksanakan karena hanya

membutuhkan waktu singkat dan data yang lebih mudah di dapat. Sedangkan kelemahannya adalah hasil perhitungan yang di dapat bersifat umum.

Pendekatan mikro adalah metode yang menggunakan variabel lain selain jumlah siswa usia sekolah seperti pencapaian atau jarak, pemukiman, demografis, ekonomi dan variabel non kependidikan lainnya yang relevan. Hasil yang diperoleh mendekati kenyataan. Kelemahannya adalah diperlukan waktu lebih lama dan biaya yang lebih besar.

Manfaat yang didapat dari proyeksi kebutuhan ruang kelas adalah alokasi tepat dengan keperluan daerah dan cocok dengan kebutuhan nyata sekolah. Dengan alokasi kebutuhan yang tepat maka bangunan ruang kelas yang akan dibangun bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Rumus kebutuhan ruang kelas seluruhnya:

$$BRKt = \frac{PSt}{\left(\frac{S}{K}\right)t \times \left(\frac{K}{RK}\right)t} - (RKL_{t-1} + RKS_{t-1}) \quad \dots\dots\dots (8)$$

Keterangan:

- BRKt = Jumlah kebutuhan ruang kelas seluruhnya tahun ke t
- PSt = Proyeksi siswa pada tahun t
- (S/K)t = Rasio siswa perkelas tahun ke t
- (K/RK)t = Rasio kelas per ruang kelas tahun ke t
- RKL_{t-1} = Jumlah ruang kelas lama yang sudah ada
- RKS_{t-1} = Jumlah ruang kelas yang sedang dibangun atau yang telah dibangun tetapi belum digunakan.

2.5. Pemilihan Jenis Sekolah Menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Pengelolaan sekolah menengah ini dibawah Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Secara pembagian bahwa Departemen Pendidikan Nasional membawahi untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sedangkan Departemen Agama membawahi untuk Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Dari masing masing bentuk pendidikan menengah tersebut punya kekhususan dan ciri tersendiri. Kekhususan ciri tersebut menjadikan Sekolah Menengah punya karakteristik dalam program pendidikannya. Sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekolah menengah atas sesuai dengan kurikulum dan tujuan penyelenggaraannya tentu menghasilkan para lulusan yang memiliki kemampuan umum dalam pendidikan menengah. Sedangkan sekolah menengah kejuruan, tentu akan memiliki kemampuan khusus sesuai dengan jurusan yang dipilih. Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pendidikan Menengah Kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk jenis pekerjaan tertentu.

Umum diketahui bahwa para siswa SMA hanya dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan umum semata. Aspek pengetahuan (*kognitif*) dan sikap

(*afeksi*) lebih diberi bobot yang besar, sedangkan aspek keterampilan (*psikomotorik*) kurang mendapat porsi yang cukup. Akibatnya, para lulusan SMA praktis tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk langsung terjun ke bursa lapangan kerja. Atau jika mereka hendak menciptakan lapangan kerja, mereka terkendala dengan minimnya keterampilan yang mereka miliki. Hal ini memang disebabkan bahwa lulusan SMA lebih disiapkan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, berbeda halnya dengan sekolah kejuruan yang lebih mempersiapkan siswa untuk terjun ke dunia kerja setelah menyelesaikan sekolahnya. Ada fenomena menarik yang terjadi selama ini bahwa, tujuan lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seringkali kurang tepat sasaran (Nahdi, 2006)

Persoalan lapangan kerja di Indonesia memang menjadi salah satu faktor mengapa sebagian siswa memilih masuk ke SMK. Para siswa tersebut cenderung mencari sekolah yang bisa mempermudah untuk mencari pekerjaan. Ini juga dipengaruhi semakin tingginya biaya untuk melanjutkan kuliah.

2.5.1. Kebijakan publik

Teori kebijakan publik melihat kebijakan sebagai sebuah formulasi keputusan kolektif dari individu individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut (Tilaar&Nugroho, 2008).

Kebijakan publik dalam memilih jenis sekolah menengah didukung oleh UU no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 12 yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan

berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

Siswa SLTP dapat memilih sekolah menengah berdasarkan minat yang dimilikinya. Mereka dapat memilih karier agar mantap ke SMK atau SMA. Survei kecil terhadap siswa SMK mengenai alasan utama memilih kejuruan itu lebih banyak mengarah pada ketidakterediaan dana pendidikan untuk melanjutkan ke PT, dengan asumsi selepas SMK langsung siap kerja (Soegiyoharto, 2005). Hal ini sesuai dengan asumsi bahwa setelah lulus SMK bisa langsung masuk pasar kerja sedangkan lulusan SMA lebih dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

2.5.2. Kebijakan Pemerintah

Dalam penentuan jenis Sekolah Menengah faktor lain yang berperan adalah kebijakan pemerintah. Sesuai dengan teori kelembagaan tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah (Tilaar & Nugroho, 2008)

Kecenderungan yang terjadi pada lulusan sekolah menengah menjadi suatu pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan penentuan jenis sekolah menengah. Data lulusan SMA yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi berdasarkan berita di harian Kompas tanggal 5 Agustus 2008 hanya mencakup 17,2%. Dengan hanya 17,2 % yang melanjutkan ke perguruan tinggi maka masih terdapat 82,8 % lulusan SMA yang tidak melanjutkan tanpa bekal keterampilan untuk bisa terjun ke dunia kerja, karena Sekolah Menengah Atas memang lebih dipersiapkan untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Atas

fenomena ini, diharapkan sistem pendidikan di Indonesia dapat dikembangkan untuk meningkatkan angka siap kerja dan mencegah bertambahnya pengangguran.

Menjawab permasalahan ini, agaknya Pendidikan Kejuruan menjadi salah satu jalan keluarnya dalam menyiapkan sumber daya manusia yang cukup potensial. Pendidikan Kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu berkerja pada suatu kelompok pekerjaan (Evans, 1978). Atau dengan kata lain Pendidikan Kejuruan adalah Pendidikan yang mempersiapkan peserta didiknya untuk memasuki lapangan kerja.

Mengenai perkembangan terakhir jumlah sekolah menengah kejuruan di Indonesia, Dr. Joko Sutrisno, Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) dalam Andini 2007 menyampaikan bahwa pada tahun 2007 Indonesia telah punya sekitar 6.600 SMK dengan jumlah siswa yang berkisar pada angka 2.750.000 orang. Pemerintah juga akan terus memperbanyak pembangunan SMK, serta mengurangi pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga 2015 rasio perbandingan SMK dan SMA menjadi 70 berbanding 30. Tujuan memperbanyak SMK tersebut, agar lulusannya yang ingin bekerja bisa langsung masuk ke pasar kerja (Fasli Jalal dalam Wibowo, 2008).

Tujuan memperbanyak SMK tersebut, untuk memenuhi tenaga kerja menengah di sektor manufaktur, industri pengolahan, konstruksi, pertambangan, perdagangan, jasa kemasyarakatan, pariwisata, TIK, pertanian, serta teknologi dan seni (Renstra Depdiknas 2005-2009)

2.5.3. Perencanaan Pendidikan

Perencanaan adalah suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi (peristiwa, keadaan, suasana, dan sebagainya) dan apa yang akan dilakukan (intensifikasi, eksistensifikasi, revisi, renovasi, substitusi, kreasi dan sebagainya). Rangkaian proses kegiatan itu dilaksanakan agar harapan tersebut dapat terwujud menjadi kenyataan di masa yang akan datang yaitu dalam jangka waktu tertentu (Udin Syaefudin, 2007).

Menurut Guruge dalam Udin Syaefudin perencanaan pendidikan adalah proses mempersiapkan kegiatan dimasa depan dalam bidang pembangunan pendidikan.

Sedangkan Soenaryo dalam Usman 2006 membagi beberapa pendekatan dalam perencanaan pendidikan yaitu:

2.5.3.1. Pendekatan Kebutuhan Sosial (*Social Demand approach*)

Pendekatan kebutuhan sosial adalah pendekatan yang didasarkan atas keperluan masyarakat pada saat ini. Pendekatan ini menitikberatkan pada tujuan pendidikan yang mengandung misi pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun merupakan contoh penerapan pendekatan ini.

Ada tiga kelemahan pendekatan ini yaitu (1) mengabaikan masalah alokasi dalam skala nasional, dan secara samar tidak mempermasalahkan besarnya sumber daya pendidikan yang dibutuhkan karena beranggapan bahwa penggunaan sumber daya pendidikan yang terbaik adalah untuk segenap rakyat Indonesia. (2)

pendekatan ini mengabaikan kebutuhan perencanaan ketenagakerjaan (*manpower planning*) yang diperlukan di masyarakat sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sebenarnya kurang dibutuhkan masyarakat. (3) pendekatan ini cenderung hanya menjawab pemerataan pendidikan saja sehingga kuantitas lulusan lebih diutamakan ketimbang kualitasnya.

2.5.3.2. Pendekatan Ketenagakerjaan (*manpower approach*)

Pendekatan ketenagakerjaan adalah pendekatan yang mengutamakan keterkaitan lulusan dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja. Apabila dikaji dari semakin membengkaknya angka pengangguran, maka keperluan mempertemukan kepentingan dunia pendidikan dengan dunia kerja semakin mendesak. Contoh pendekatan ini adalah kebijakan pendidikan sistem ganda melalui *link and match*.

Pendekatan ini mempunyai tiga kelemahan yaitu (1) mempunyai peranan yang terbatas terhadap perencanaan pendidikan, pendekatan ini mengabaikan sekolah menengah umum karena hanya akan menghasilkan pengangguran saja, pendekatan ini lebih mengutamakan sekolah menengah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja. (2) menggunakan klasifikasi dan rasio permintaan dan persediaan. (3) tujuan utamanya untuk memenuhi tuntutan dunia kerja, di sisi lain tuntutan dunia kerja selalu berubah-ubah dengan cepatnya.

2.5.3.3. Pendekatan *Cost Effectiveness*

Pendekatan ini menitik beratkan pemanfaatan biaya secermat mungkin

untuk mendapatkan hasil pendidikan yang seoptimal mungkin, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pendidikan ini hanya diadakan jika benar-benar memberikan keuntungan yang relatif pasti, baik bagi penyelenggara maupun peserta didik.

2.5.3.4. Pendekatan Terpadu

Pendekatan ini merupakan perpaduan dari ketiga pendekatan di atas yaitu berusaha memenuhi kebutuhan sosial masyarakat, pemenuhan ketenaga kerjaan dengan biaya seefektif mungkin.

2.6. Tinjauan Teori Lokasi

Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (*spatial order*) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial (Tarigan, 2006).

Salah satu hal yang banyak dibahas dalam teori lokasi adalah pengaruh jarak terhadap intensitas orang bepergian dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Analisis ini dapat dikembangkan untuk melihat suatu lokasi yang memiliki daya tarik terhadap batas wilayah pengaruhnya, dimana orang masih ingin mendatangi pusat yang memiliki daya tarik tersebut. Hal ini terkait dengan besarnya daya tarik pada pusat tersebut dan jarak antara lokasi dengan pusat tersebut.

Terkait dengan lokasi maka salah satu faktor yang menentukan apakah suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak adalah tingkat aksesibilitas. Tingkat aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain di sekitarnya (Tarigan, 2006). Menurut Tarigan, tingkat aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak, kondisi prasarana perhubungan, ketersediaan berbagai sarana penghubung termasuk frekuensinya dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut.

2.6.1 Teori Tempat Pemusatan

Menurut Christaller, pusat-pusat pelayanan cenderung tersebar di dalam wilayah menurut pola berbentuk heksagon (segi enam). Christaller mengembangkan modelnya untuk suatu wilayah yang mempunyai ciri-ciri wilayahnya adalah suatu dataran tanpa romaan, semua adalah datar dan sama, gerakan dapat dilaksanakan ke segala arah (*isotropic surface*), penduduk mempunyai daya beli sama dan tersebar secara merata pada seluruh wilayah, konsumen bertindak secara rasional sesuai dengan prinsip minimasi biaya (Tarigan, 2006).

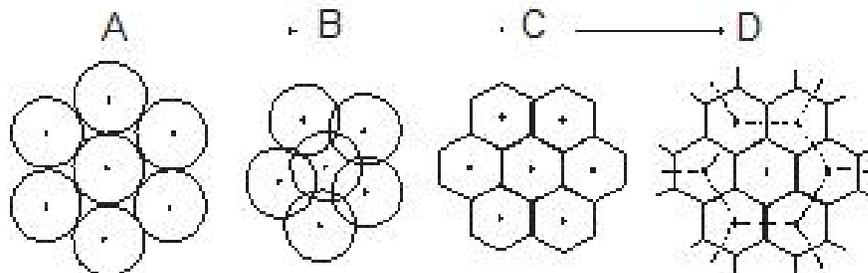
Dalam asumsi yang sama dengan Christaller, Lloyd melihat bahwa jangkauan/luas pelayanan dari setiap komoditas itu ada batasnya yang dinamakan *range* dan ada batas minimal dari luas pelayanannya dinamakan *threshold*. (Tarigan, 2006)

Ambang penduduk (*threshold population*) adalah jumlah penduduk minimum untuk dapat mendukung penawaran akan suatu jasa (Djoyodipuro,

1992). Ambang batas penduduk ini dikenal dengan *threshold* yaitu luas pasar minimal (Tarigan, 2006).

Jangkauan pasar suatu aktivitas jasa adalah jarak yang seseorang masih bersedia menempuhnya untuk mendapatkan jasa yang bersangkutan, lebih jauh dari jarak itu maka orang tersebut akan mencari tempat lain yang lebih dekat untuk mencari kebutuhan jasa yang sama (Djoyodipuro, 1992). Jangkauan ini juga dinamakan *range* yaitu batas luas pasar setiap komoditas (Tarigan, 2006).

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dijelaskan model Christaller tentang terjadinya model area pelayanan heksagonal sebagai berikut: (Tarigan, 2006).



Sumber : Tarigan, 2006

GAMBAR 2.4
MODEL TERJADINYA AREA PELAYANAN HEKSAGONAL
CHRISTALLER

- a. Mula-mula terbentuk area pelayanan berupa lingkaran-lingkaran. Setiap lingkaran memiliki pusat dan menggambarkan *threshold*. Lingkaran-lingkaran ini tidak tumpang tindih seperti pada bagian A dari Gambar II.4.

- b. Kemudian digambarkan lingkaran-lingkaran berupa *range* dari pelayanan tersebut yang lingkarannya boleh tumpang tindih seperti terlihat pada bagian B.
- c. *Range* yang tumpang tindih dibagi antara kedua pusat yang berdekatan sehingga terbentuk areal yang heksagonal yang menutupi seluruh dataran yang tidak lagi tumpang tindih, seperti terlihat pada bagian C.
- d. Tiap pelayanan berdasarkan tingkat ordenya memiliki heksagonal sendiri-sendiri. Dengan menggunakan $k=3$, pelayanan orde I lebar heksagonalnya adalah 3 kali heksagonal pelayanan orde II. Pelayanan orde II lebar heksagonalnya adalah 3 kali heksagonal pelayanan orde III, dan seterusnya. Tiap heksagonal memiliki pusat yang besar kecilnya sesuai dengan besarnya heksagonal tersebut. Heksagonal yang sama besarnya tidak saling tumpang tindih, tetapi antara heksagonal yang tidak sama besarnya akan terjadi tumpang tindih, seperti terlihat pada bagian D.

2.6.2 Letak Sekolah dalam Teori Lokasi

Lokasi tempat dalam suatu ruang dapat dideskripsikan dalam bentuk lokasi absolut dan lokasi relatif (Haggett, 1968). Lokasi absolut suatu tempat, berkaitan posisinya menurut garis lintang dan garis bujur, adapun lokasi relatif berkaitan dengan hubungan tempat dengan faktor yang ada di sekitarnya.

Pemilihan lokasi kegiatan memegang peranan penting dalam perolehan target pelayanan sehingga dikatakan bahwa besarnya pelayanan yang diberikan merupakan hasil fungsi dari lokasi yang optimal atau sesuai (Jones & Simon

dalam Kumar, 1998).

Letak suatu sekolah, diharapkan dalam suatu lokasi yang baik atau optimal. Lokasi optimal adalah lokasi yang terbaik secara ekonomis (Daldjoeni, 1992). Model yang sederhana dari teori lokasi adalah memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara meminimkan biaya transportasi.

Dalam menentukan suatu lokasi kegiatan harus dikenali macam kegiatan yang akan ditentukan lokasinya, setelah itu baru bisa ditentukan faktor faktor penentu lokasi kegiatan tersebut. Faktor penentu lokasi kegiatan dapat berbeda beda tergantung jenis kegiatannya. Lokasi kegiatan jasa biasanya melayani konsumen yang berkaitan dengan jumlah penduduk (Fielding dalam Kumar, 1998). Tetapi ukuran jumlah penduduk bukan merupakan satu satunya faktor yang mempengaruhi lokasi kegiatan jasa layanan konsumen (Daniels dalam Kumar, 1998).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no 24 tahun 2007 tentang standar sarana prasarana pendidikan dan teori lokasi kegiatan jasa dapat disimpulkan bahwa lokasi suatu sekolah menengah harus memperhatikan hal hal sebagai berikut:

- a. Banyaknya anak usia sekolah setingkat SMA/MA.

Satu SMA/MA memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. Satu SMA/MA dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 6000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 6000 jiwa dapat dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada atau pembangunan SMA/MA baru.

Semakin banyak anak usia SMA yang mendiami suatu kecamatan maka akan semakin membutuhkan sarana prasarana sekolah tersebut. Penempatan lokasi sekolah harus memperhatikan siapa pengguna atau pemakai dari sekolah itu. Jadi kebutuhan suatu SMA harus dikaji berapakah jumlah anak usia sekolah yang berada pada jangkauan sekolah yang akan dibangun. Atau bisa juga dilihat berapakah banyaknya lulusan SMP pada daerah tersebut.

b. Tingkat aksesibilitas.

Tingkat aksesibilitas menunjukkan kemudahan mencapai suatu lokasi sekolah. Kemudahan ini ditentukan oleh kondisi jalan, jenis alat angkutan serta jarak. Semakin bagus kondisi jalan maka akan semakin mudah orang untuk menuju suatu lokasi, demikian juga dengan jenis alat angkut atau transport yang ada. Adanya sarana transportasi yang memadai akan mempermudah dan mempercepat pula orang untuk mencapai suatu lokasi. Faktor jarak juga berpengaruh dalam mempermudah tingkat aksesibilitas suatu lokasi. Semakin dekat suatu lokasi maka akan semakin mudah untuk dikunjungi.

c. Keamanan dan kenyamanan

Lokasi sekolah sangat membutuhkan kenyamanan dan keamanan. Tingkat keamanan dan kenyamanan akan sangat berpengaruh terhadap mental psikologi dari warga sekolah yang terdiri dari guru, siswa ataupun karyawan. Untuk menjamin keamanan dan nyaman sekolah harus memperhatikan kepada:

✓ Faktor geografis

Faktor geografis berhubungan dengan kondisi alam berupa tingkat kemiringan lahan, daerah bantaran sungai, pesisir pantai ataupun dekat dengan tebing yang terjal. Lahan terhindar dari potensi yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa serta memiliki akses untuk penyelamatan darurat selain itu kemiringan lahan rata rata kurang dari 15%.

Sebaiknya lokasi sekolah berada pada areal yang datar dan pada kondisi tanah yang stabil serta tidak terlalu dekat dengan bantaran sungai, pinggir pantai atau pada bibir jurang.

✓ Bukan daerah rawan bencana

Lokasi sekolah baiknya berada pada daerah yang jauh dari kemungkinan bencana. Juga terhindar dari pencemaran air dan pencemaran udara.

✓ Bukan daerah rawan konflik

Pada daerah rawan konflik baik itu perseteruan antar suku, antar agama ataupun antar golongan lokasi sekolah tidak nyaman untuk didirikan. Karena tidak bisa dijamin kelangsungan dari sekolah pada daerah konflik ini.

✓ Bukan daerah rawan kecelakaan

Lokasi sekolah baiknya tidak berada pada daerah rawan kecelakaan seperti jalan arteri.

✓ Jauh dari pusat keramaian umum

Untuk menciptakan suasana yang mendukung proses pembelajaran sebaiknya sekolah tidak berada dekat lingkungan keramaian seperti pasar, terminal ataupun pusat keramaian lainnya. Artinya bahwa lokasi sekolah harus jauh dari kebisingan.

d. Status Lahan

Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun. Disamping itu lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.

Pemanfaatan lahan untuk lokasi sekolah diharapkan pada suatu daerah yang bukan merupakan daerah larangan seperti hutan lindung ataupun areal produktif seperti persawahan, tetapi lahan yang digunakan untuk lokasi sekolah sebaiknya pada guna lahan yang tidak produktif seperti belukar ataupun tanah ladang. Dengan pemilihan lahan yang sesuai maka akan dapat dimanfaatkan penggunaan lahan secara optimal

**TABEL II.4
SINTESA VARIABEL**

NO	SASARAN	TOPIK	SUMBER	URAIAN	VARIABEL
1.	Teridentifikasinya kondisi sekolah menengah yang ada	Daya tampung, ketersediaan ruang kelas dan jangkauan sekolah	Permendiknas no 24 tahun 2007 dan Permendiknas no 40 tahun 2008	a. Satu SMA/MA memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. b. Satu SMK/MAK memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 48 rombongan belajar. c. Satu SMA/MA dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 6000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 6000 jiwa dapat dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada atau pembangunan SMA/MA baru. d. Daya tampung maksimum 32 siswa tiap kelas	-. Daya tampung sekolah menengah -. Ketersediaan ruang kelas -. Jangkauan sekolah menengah
		Jalur, Jenjang dan Jenis pendidikan	UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Jalur pendidikan meliputi : -. pendidikan formal -. Pendidikan non formal -. Pendidikan informal Jenjang Pendidikan meliputi : -. Pendidikan dasar -. Pendidikan menengah -. Pendidikan tinggi Jenis Pendidikan meliputi : -. Pendidikan Umum -. Pendidikan kejuruan -. Pendidikan akademik -. Pendidikan profesi -. Pendidikan vokasi -. Pendidikan keagamaan	-. Kedudukan sekolah menengah

				- Pendidikan khusus	
--	--	--	--	---------------------	--

lanjutan

NO	SASARAN	TOPIK	SUMBER	URAIAN	VARIABEL
2.	Teridentifikasinya jumlah kebutuhan sekolah menengah	Kebutuhan Sekolah dalam Isu Strategis pendidikan	Nugroho, 2006 Renstra Depdiknas 2005-2009	Isu Strategi Pendidikan Nasional adalah Pemerataan, Mutu dan Manajemen. Indikator pemerataan pendidikan meliputi jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah siswa, jumlah putus sekolah serta angka buta huruf.	Kebutuhan Sekolah Menengah
		Proyeksi Kebutuhan Sekolah Menengah	Husaini Usman (2006)	Dalam suatu proses perencanaan pendidikan, proyeksi kebutuhan sarana pendidikan merupakan suatu tahap mempersiapkan kegiatan dimasa depan dalam bidang pembangunan pendidikan. Proyeksi ini sangatlah penting agar apa yang akan dibutuhkan bisa dibuat secara tepat sesuai kondisi yang mendekati sebenarnya. Perencanaan pendidikan dengan metode proyeksi akan menghasilkan metode pemecahan penduduk lima tahunan, data persekolahan, proyeksi penduduk dan penduduk usia sekolah, proyeksi siswa, proyeksi ruang kelas serta proyeksi kebutuhan guru	- Pemecahan penduduk lima tahunan menjadi penduduk usia tahunan - Proyeksi penduduk usia sekolah - Proyeksi kebutuhan ruang kelas dan kebutuhan sekolah menengah

lanjutan

NO	SASARAN	TOPIK	SUMBER	URAIAN	VARIABEL
3.	Teridentifikasinya minat lulusan SLTP yang akan melanjutkan ke jenjang sekolah menengah	Kebijakan publik dan minat memilih sekolah menengah	Tilaar&Nugroho, 2008 UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Teori kebijakan publik melihat kebijakan sebagai sebuah formulasi keputusan kolektif dari individu individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut . Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya	Minat lulusan SLTP memilih sekolah menengah
4.	Teridentifikasinya jenis sekolah menengah yang dibutuhkan	Penentuan jenis sekolah menengah berdasarkan minat dan kebijakan pemerintah	Renstra Depdiknas 2005-2009 Joko Sutrisno dalam Andini 2007 Udin Syaefudin 2007 Rupet Evans dalam Muslim 2004	Sekolah Menengah Atas lebih banyak mempersiapkan siswanya untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, walaupun ada beberapa SMA yang membekali siswanya dengan ketrampilan pada kurikulum muatan lokalnya. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah diarahkan untuk penguasaan ketrampilan agar bisa mengisi pasar kerja. - Kebijakan publik, minat lulusan SLTP - Kebijakan pemerintah, perbandingan SMK dengan SMA direncanakan 70% : 30 % pada tahun 2015 - Perencanaan pendidikan	- Penentuan jenis sekolah menengah

lanjutan

NO	SASARAN	TOPIK	SUMBER	URAIAN	VARIABEL
5.	Teridentifikasinya lokasi sekolah menengah	Teori Lokasi	Robinson Tarigan (2003)	Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (<i>spatial order</i>) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial.	- Lokasi sekolah menengah
		Lokasi Sekolah menengah	Daldjoeni (1992) Permendiknas no 24 tahun 2007 dan Permendiknas no 40 tahun 2008 SNI 03 1733 tahun 2004	Letak suatu sekolah, diharapkan dalam suatu lokasi yang baik atau optimal. Lokasi optimal adalah lokasi yang terbaik secara ekonomis. Model yang sederhana dari teori lokasi adalah memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara meminimkan biaya transportasi Lokasi sekolah harus memenuhi kriteria : - Satu SMA/MA dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 6000 jiwa. Jadi diharapkan bahwa lokasi sekolah harus terletak pada wilayah dengan penduduk usia sekolah yang membutuhkan pelayanan sekolah tersebut. - jangkauan pelayanan SMA pada radius 3000 meter. Untuk pemerataan maka lokasi sekolah baru diharapkan berada diluar jangkauan sekolah yang telah ada	- Lokasi sekolah menengah

lanjutan

NO	SASARAN	TOPIK	SUMBER	URAIAN	VARIABEL
				<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat aksesibilitas bahwa lokasi sekolah harus mudah diakses atau dekat dengan jalan kolektor - Keamanan dan kenyamanan meliputi faktor geografis, bukan daerah rawan bencana, bukan daerah rawan konflik, bukan daerah rawan kecelakaan, jauh dari pusat keramaian umum. - Status lahan sesuai dengan fungsinya untuk sarana pendidikan 	

Sumber : Hasil Analisis 2009

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

3.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang menghubungkan daerah bagian selatan dengan pusat pemerintahan yaitu Semarang. Daerah bagian selatan Jawa Tengah seperti Purwokerto, Cilacap melalui jalan darat akan sangat mudah untuk ditempuh melalui Kabupaten Wonosobo. Dengan letak di antara $7^{\circ}11''$ dan $7^{\circ}36''$ lintang selatan dan $109^{\circ}43''$ dan $110^{\circ}04''$ bujur timur terbagi menjadi 15 kecamatan dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Batang, Kendal sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung, Magelang sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Kebumen dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara.

Dengan ketinggian berkisar antara 270 meter sampai dengan 2.250 meter di atas permukaan laut serta luas wilayah 98.468 hektar dengan tingkat kemiringan sebagian besar lebih dari 30%, merupakan daerah pegunungan dengan beberapa wilayahnya masih sulit terjangkau dikarenakan akses jalan yang belum maksimal. Kondisi curah hujan dan tingkat kesuburan tanahnya menyebabkan penduduk banyak mengandalkan pencaharian dari sektor pertanian. Hasil produksi sektor pertanian yang paling menonjol adalah sayuran, palawija dan perkebunan teh.

3.1.1 Kondisi Pendidikan

Dalam bidang pendidikan Kabupaten Wonosobo masih harus banyak berbenah dalam memberikan pelayanan serta kesempatan memperoleh pendidikan kepada masyarakatnya. Hal ini bisa dilihat dari angka partisipasi yang masih tergolong rendah untuk sekolah menengah jika dibandingkan dengan angka ideal yang mencapai 100%.

TABEL III.1
INDIKATOR PEMERATAAN PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2006

No.	Indikator	SD+MI	SMP+MTs	SM+MA	Lainnya
1.	APK	100,92	67,52	26,81	-
	a. laki2	101,46	64,08	25,66	-
	b. perempuan	98,87	71,19	28,04	-
	c. kota	116,63	85,34	128,45	-
	d. desa	91,16	50,71	10,54	-
2.	APM	88,33	61,64	18,89	-
3.	Perbandingan Antarjenjang	-	6,38	3,06	-
4.	Rasio				-
	a. Siswa/Sekolah	161	333	420	-
	b. Siswa/Kelas	24	36	37	-
	d. Siswa/Guru	19	16	14	-
	e. Kelas/R.Kelas	1,09	2,31	1,02	-
	f. Kelas/Guru	0,78	1,00	0,37	-
5.	Angka Melanjutkan	-	77,70	71,34	-
6.	Tingkat Pelayanan Sekolah	144	100	112	-
7.	Kepadatan Penduduk	99 Km2	48 Km2	24 Km2	782 Km2

sumber: profil pendidikan Kabupaten Wonosobo tahun 2007

Berdasarkan data yang ada pada Tahun 2006/2007 kondisi pendidikan menengah meliputi jumlah SMA, SMK, dan MA sebanyak 31, siswa baru tingkat I sebesar 4.377, siswa seluruhnya sebesar 12.047 dan lulusan sebesar 2.511.

Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 352 dengan rincian 315 kondisi baik, 30 kondisi rusak ringan, dan 7 kondisi rusak berat dengan jumlah kelas sebesar 327. Guru yang mengajar di SMA, SMK dan MA sebanyak 980 diantaranya yaitu sebanyak 938 (95.71%) adalah layak mengajar 22 (2.24%) semi layak, dan 22 (2.24 %) tidak layak mengajar.

Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMA, SMK dan MA terdapat fasilitas perpustakaan sebesar 24, lapangan olah raga sebesar 20, UKS sebesar 20, laboratorium sebesar 53, keterampilan sebesar 7, BP sebesar 23, serba guna sebesar 5, Bengkel sebesar 9 dan ruang praktik sebesar 12.

TABEL III.2
DATA POKOK SMA, MA, SMK
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2006/2007

No.	Komponen	SMA	MA	SMK	SM+MA
1.	Sekolah	17	3	11	31
2.	Siswa Baru Tk. 1	2.437	575	1.365	4.377
3.	Siswa	6.955	1446	3.646	12.047
4.	Lulusan	1.659	336	516	2.511
5.	Ruang Kelas	192	48	112	352
	a. Baik	182	37	96	315
	b. Rusak Ringan	7	9	14	30
	c. Rusak Berat	3	2	2	7
6.	Kelas	191	38	98	327
7.	Guru	518	99	363	980
	a. Layak mengajar	507	99	332	938
	b. Semi layak	5	0	17	22
	c. Tidak layak	6	0	16	22
8.	Fasilitas				
	a. Perpustakaan	15	3	6	24
	b. Lapangan olahraga	9	3	8	20
	c. UKS	11	3	6	20
	d. Laboratorium	30	6	17	53
	e. Keterampilan	5	1	1	7
	f. BP	13	3	7	23
	g. Serbaguna	4	0	1	5
	h. Bengkel	0	0	9	9
	i. Ruang Praktik	0	0	12	12

sumber: profil pendidikan Kabupaten Wonosobo tahun 2007

3.1.2 Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo pada tahun 2006 adalah 770.091 orang. Dan jumlah tersebut, 97.496 berusia 7-12 tahun (12,66%), 46.811 berusia 13-15 tahun (6,07%), dan 44.940 berusia 16-18 tahun (5,84%). Berdasarkan data tahun 2002 penduduk Kabupaten Wonosobo bertambah 0,83% per tahun dengan angka kelahiran sebesar 1.28% dan angka kematian 0,1%. Angka migrasi ke luar diperkirakan sebesar 0,2% per tahun dan migrasi ke dalam sebesar 0,76% per tahun. Menurut catatan terakhir pada Tahun 2006 kepadatan penduduk adalah 812.26 per km² dengan Kecamatan Wonosobo sebagai kecamatan terpadat (3.931.65 per km²) dan Kecamatan Wadaslintang sebagai kecamatan terjarang (763.40 per km²).

TABEL III.3
KEADAAN DEMOGRAFI
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2006

No.	Komponen	Jumlah	No.	Komponen	Jumlah
1.	Penduduk seluruh	770.091	2.	Penduduk 13—15 th	46.811
3.	Penduduk 7—12 th	97.496	4.	Penduduk 1&—18 th	44.940
5.	Tingkat pendidikan penduduk	770.091	6.	Tingkat kepandaian membaca	664.322
	a. Tidak/belum pernah sekolah	104.945		a. Dapat membaca menulis	652.618
	b. Tdk/belum tamat SD	180.662		b. Buta huruf	11.704
	c. Tamat SD	330.325	7.	Angkatan Kerja	280.169
	d. Tamat SMP	73.425		a. Bekerja	245.720
	e. Tamat SMA	40.437		b. Mencari pekerjaan	34.449
	f. Tamat SMK	10.014	8.	Bukan Angkatan kerja	341.809

Lanjutan

No.	Komponen	Jumlah	No.	Komponen	Jumlah
	g. Tamat Diploma I/II	3.396		a. bersekolah	141.569
	h. Tamat D3/Sarmud	3.087		b. Mengurus RT	111.453
	i. Tamat Sarjana	3.305		c. Lainnya	88.787
	j. Tidak Terjawab	20.495	9.	Penduduk Miskin	85.766
				a. Kota	6.553
				b. Desa	79.213

sumber : profil pendidikan Kabupaten Wonosobo tahun 2007

3.1.3 Kondisi Geografi

Faktor geografi yang berpengaruh mencakup aspek keadaan alam dan sumber daya alam (SDA) sehingga dapat berpengaruh besar terhadap pembangunan pendidikan. Pengaruh ini dapat bersifat menunjang dan dapat pula bersifat menghambat. Tersedianya SDA merupakan faktor yang menunjang pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. Keadaan geografi yang tidak menguntungkan antara lain keadaan pemukiman penduduk yang berpencar-pencar dan terpencil serta pemukiman yang padat merupakan kendala dalam upaya peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar.

TABEL III.4
KEADAAN GEOGRAFI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2006

No.	Variabel	Jumlah
1.	Sumber daya alam yang menonjol	Tanah subur
2.	Keadaan Alam	
	a. Musim kemarau	4 Bulan
	b. Musim penghujan	8 Bulan
3.	Curah hujan	
	a. Tertinggi	4.387
	b. Terendah	2.514

sumber: profil pendidikan Kabupaten Wonosobo tahun 2007

3.1.4 Kondisi Perekonomian

Di bidang ekonomi mata pencaharian penduduk adalah di sektor pertanian, perburuan, dan perikanan sebanyak 136.454 orang (33,4%); di sektor pertambangan dan penggalian sebanyak 2.573 orang (0,18%); di sektor industri pengolahan sebanyak 31.504 orang (2,4%), di sektor listrik, gas dan air sebanyak 4.121 orang (0,07%); di sektor bangunan sebanyak 8.420 orang (2,1%), di sektor perdagangan 54.692 orang (4,25 %); di sektor perhubungan 10.991 orang (1,37%); di sektor keuangan 10.809 orang (13,36%) dan di sektor jasa lainnya 9.289 orang (42,76 %).

TABEL III.5
KEADAAN PEREKONOMIAN KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2006

No	Komponen	Jumlah	No	Komponen	Jumlah
1.	Pendapatan asli daerah/PAD	25.533.351.000	2.	Pendapatan per kapita	630.718
3.	Pajak Bumi & Bangunan (PBB)	11.354.417.000,00	4.	Upah minimum regional (UMR)	500.800
5.	Mata pencaharian		6.	Mata pencaharian	
	1. Pertanian	136.454	1.	Perdagangan	54.692
	2. Pertambangan	2.573	2.	Perhubungan	10.991
	3. Industri Pengolahan	31.504	3.	Keuangan	10.809
	4. Listrik, gas, dan air	4.121	3.	Jasa lainnya	9.289
	5. Bangunan .	8.420			

sumber: profil pendidikan Kabupaten Wonosobo tahun 2007

3.1.5 Kondisi Sarana Prasarana Transportasi

Sarana dan prasarana perhubungan baik transportasi dan komunikasi merupakan sarana untuk memperpendek jarak antara daerah satu dengan yang

lain.. Semua sarana tersebut ditujukan untuk rnemperlancar arus barang dan jasa dan satu tempat ke tempat lain, meningkatkan mobilitas manusia ke tempat tujuan baik dari pedesaan sampai ke perkotaan, daerah perbatasan sampai ke daerah terpencil, ataupun membantu kemudahan siswa dari tempat tinggal menuju ke sekolah.

TABEL III.6
KEADAAN TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2006

No.	Variabel	Jumlah	No.	Variabel	Jumlah
1.	Kelas Jalan			c. Kelas III	810,10 km
	a. Kelas I	87,9 km		- Kondisi Baik	605,03 km
	- Kondisi Baik	87,9 km		-Kondisi Sedang	104,70 km
	- Kondisi Sedang			- Kondisi Rusak	100,37 km
	- Kondisi Rusak		3.	Jumlah TV	26.453
	b. Kelas II	94,33 km	4.	Jumlah Telepon	5.155
	- Kondisi Baik	63,12 km	5.	Jumlah Warnet	3
	- Kondisi Sedang	30,11 km	6.	Jumlah Wartel	150
	- Kondisi Rusak	3,10 km			

sumber: profil pendidikan Kabupaten Wonosobo tahun 2007

3.2. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Kertek

Kecamatan Kertek merupakan salah satu kecamatan di sebelah timur Kota Wonosobo yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Temanggung. Pusat pemerintahan Kecamatan Kertek berjarak 8 km dari ibukota Kabupaten Wonosobo dan 112 km dari ibukota Provinsi Jawa Tengah. Dengan luas wilayah mencapai 6.214.365 ha yang terdiri dari 2 kelurahan dan 19 desa merupakan dataran ringgi dengan ketinggian 875 diatas permukaan laut sehingga seperti

daerah lainnya di Kabupaten Wonosobo merupakan daerah pegunungan yang beriklim sejuk.

3.2.1. Karakteristik Fisik

3.2.1.1. Topografi dan Morfologi

Kecamatan Kertek memiliki ketinggian 875 m diatas permukaan laut dan memiliki kelerengan sebesar 8–15 %. Kelerengan adalah suatu kemiringan tanah dimana sudut kemiringan dibentuk oleh permukaan tanah dengan bidang horizontal dan biasanya dinyatakan dalam persen.

3.2.1.2. Kondisi Geologi

Kecamatan Kertek terletak dilembar Gunung Sumbing dan Sindoro yang merupakan gunung api muda. Karena terletak dilembar gunung api yang masih muda maka wilayahnya merupakan daerah subur sehingga sangat mendukung untuk pertanian dan perkebunan.

Selain memberikan keuntungan untuk pertanian dan perkebunan, Gunung Sumbing dan Sindoro juga menjadi sumber mata air. Oleh karena itu wilayah Kecamatan Kertek hampir tidak pernah merasa kekurangan air baik air bersih maupun air untuk areal pertanian.

3.2.1.3. Iklim

Seperti wilayah Indonesia pada umumnya yang beriklim tropis, kecamatan Kertek juga beriklim tropis dengan variasi temperatur dan kelembaban serta memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Dengan letak

dilereng pegunungan dengan suhu rata rata berkisar antara 22-23,2 derajat celcius dan suhu maksimum sebesar 29,6 derajat celcius.

3.2.2. Karakteristik Non Fisik

3.2.2.1. Administratif

Kecamatan Kertek terbagi menjadi 2 kelurahan dan 19 desa. Kelurahan adalah sebuah unit administrasi dibawah tingkat kecamatan, sedangkan desa adalah satuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat yang mempunyai organisasi pemerintahan dan langsung dibawah camat serta berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia. Desa atau kelurahan terbagi lagi menjadi beberapa dusun yang diketuai oleh seorang kadus .

TABEL III.7
BANYAKNYA DUKUH, DUSUN, RW DAN RT
KECAMATAN KERTEK TAHUN 2006

NO	DESA	Dukuh	Dusun	RW	RT
1	Sindupaten	5	5	5	31
2	Surengede	4	4	10	20
3	Bojasari	6	5	10	33
4	Kertek	7	4	9	61
5	Sumberdalem	5	2	6	33
6	Purwojati	4	3	8	43
7	Karangluhur	9	4	9	47
8	Ngadikusuman	5	4	8	21
9	Wringinanom	2	2	5	11
10	Sudungdewo	5	3	6	18

11	Bejiarum	5	3	8	45
12	Damarkasian	3	3	6	35
13	Banjar	2	2	4	12
14	Tlogodalem	4	4	4	26
15	Tlogomulyo	4	3	5	16
16	Pagerejo	6	6	8	43
17	Candimulyo	4	4	8	35
18	Purbosono	3	3	5	20
19	Candiyasan	4	4	8	27
20	Kapencar	2	2	9	57
21	Reco	6	4	10	94
		95	72	151	731

Sumber:Kecamatan Kertek dalam angka tahun 2007

Dengan kondisi geografis yang sangat beragam, maka jarak dan waktu tempuh dari desa ke ibukota kecamatan ataupun ke ibukota kabupaten sangat dipengaruhi oleh kondisi sarana prasarana transportasi yang ada. Semakin bagus kondisi sarana prasarana yang ada akan semakin sedikit waktu tempuh yang dibutuhkan demikian juga sebaliknya. Jadi kondisi sarana prasarana transportasi sangat berpengaruh terhadap waktu tempuh yang dibutuhkan. Sarana prasarana transportasi ini bisa berupa jalan raya serta alat transportasi.

TABEL III.8
JARAK DAN WAKTU TEMPUH
DARI DESA KE IBUKOTA KECAMATAN DAN KABUPATEN
TAHUN 2007

NO	DESA	Ke Kecamatan		Ke Kabupaten	
		Jarak Km	Waktu tempuh	Jarak Km	Waktu tempuh
1	Sindupaten	3.5	20	12,5	35
2	Surengede	3.0	15	12.0	30
3	Bojasari	3.	15	8.0	20
4	Kertek	0.2	5	9.0	20
5	Sumberdalem	0.9	10	10.0	25
6	Purwojati	2.0	15	11.0	30
7	Karangluhur	1.3	8	8.0	20
8	Ngadikusuman	3.7	20	7.0	20
9	Wringinanom	5.0	20	4.0	10
10	Sudungdewo	4.0	15	5.0	12
11	Bejiarum	6.0	25	7.0	25
12	Damarkasian	10.0	30	10.0	30
13	Banjar	7.0	25	9.0	27
14	Tlogodalem	5.5	20	10.0	30
15	Tlogomulyo	8.5	30	17.0	60
16	Pagerejo	6.0	25	15.0	50
17	Candimulyo	2.8	15	12.0	25
18	Purbosono	6.0	20	15.0	35
19	Candiyasan	6.0	20	15.0	30
20	Kapencar	7.0	25	16.0	40
21	Reco	8.0	20	17.0	40

Sumber: Kecamatan Kertek dalam angka tahun 2007

3.2.2.2. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Kertek pada akhir tahun 2007 sebanyak 76.330 jiwa terdiri dari 38.594 laki laki dan 37.733 perempuan di yang tersebar di 21 desa/kelurahan dengan sex rasio 102. Penyebaran di 21 desa cukup merata berkisar antara 1.000 sampai 7.000 jiwa dengan kepadatan rata rata 1.219 jiwa/km². Desa terpadat adalah kelurahan Kertek dengan kepadatan 3.276 jiwa/km², sedangkan yang terjarang adalah Tlogomulyo dengan kepadatan 316 jiwa/km².

TABEL III.9
JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH , KEPADATAN PENDUDUK
KECAMATAN KERTEK TAHUN 2007

NO	DESA	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	Sindupaten	3.335	1.633	2.042
2	Surengede	3.308	1.603	2.063
3	Bojasari	2.873	1.751	1.640
4	Kertek	6.940	2.103	3.300
5	Sumberdalem	3.157	1.053	2.998
6	Purwojati	3.816	1.660	2.298
7	Karangluhur	4.848	2.190	2.213
8	Ngadikusuman	2.863	1.789	1,600
9	Wringinanom	2.211	1.200	1.842
10	Sudungdewo	3.048	1.711	1.781
11	Bejiarum	3.061	1.581	1.936
12	Damarkasian	2.610	5.638	462

13	Banjar	1.383	0.967	1.430
14	Tlogodalem	1.954	1.445	1.352
15	Tlogomulyo	1.700	5.362	317
16	Pagerejo	4.929	4.380	1.125
17	Candimulyo	5.275	4.130	1.277
18	Purbosono	2.683	1.620	1.656
19	Candiyasan	4.009	8.088	495
20	Kapencar	5.341	6.332	843
21	Reco	6.986	5.907	1.162
		76.330	62.144	1.228

Sumber:Kecamatan Kertek dalam angka tahun 2007

TABEL III.10
PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN.
DI KECAMATAN KERTEK TAHUN 2006

NO	DESA	0-4 tahun			5-9 tahun			10-14 tahun			15-19 tahun			20-24 tahun			25-29 tahun		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	Sindupaten	171	179	350	172	176	348	157	181	338	161	159	320	157	149	306	122	151	273
2	Surengede	165	168	333	162	144	306	181	161	342	183	164	347	135	115	250	146	139	285
3	Bojasari	138	126	264	160	152	312	155	160	315	148	115	263	88	94	182	105	120	225
4	Kertek	295	326	621	332	339	671	403	332	735	362	370	732	323	324	647	295	295	590
5	Sumberdalem	133	157	290	157	162	319	167	171	338	176	175	351	150	168	318	154	128	282
6	Purwojati	201	210	411	231	239	470	205	205	410	179	177	356	183	161	344	168	151	319
7	Karangluhur	237	250	487	279	265	544	302	269	571	266	227	493	204	238	442	190	182	372
8	Ngadikusuma	127	124	251	183	164	347	182	143	325	152	113	265	123	107	230	130	129	259
9	Wringinanom	98	97	195	129	123	252	100	115	215	116	95	211	80	90	170	77	103	180
10	Sudungdewo	157	160	317	168	172	340	173	179	352	188	134	322	122	110	232	105	112	217
11	Bejiarum	154	125	279	132	166	298	151	144	295	157	102	259	140	129	269	120	142	262
12	Damarkasian	129	137	266	133	140	273	124	116	240	132	131	263	130	109	239	118	118	236
13	Banjar	66	56	122	87	71	158	79	74	153	67	58	125	60	64	124	42	59	101
14	Tlogodalem	98	101	199	127	98	225	109	97	206	112	88	200	103	96	199	71	71	142
15	Tlogomulyo	78	72	150	87	88	175	82	67	149	80	75	155	80	78	158	83	68	151
16	Pagerejo	243	260	503	291	245	536	264	267	531	238	240	478	211	194	405	185	250	435
17	Candimulyo	257	273	530	296	290	586	280	300	580	299	298	597	228	244	472	232	189	421
18	Purbosono	94	113	207	155	132	287	171	135	306	151	161	312	136	113	249	108	107	215
19	Candiyasan	190	180	370	201	191	392	198	192	390	223	217	440	223	178	401	180	147	327
20	Kapencar	266	224	490	300	252	552	285	250	535	298	264	562	253	245	498	247	238	485
21	Reco	322	314	636	308	324	632	302	323	625	341	353	694	376	362	738	326	339	665
		3.619	3.652	7.271	4.090	3.933	8.023	4.070	3.881	7.951	4.029	3.716	7.745	3.505	3.368	6.873	3.204	3.238	6.442

Sumber: Kecamatan Kertek dalam angka tahun 2006

TABEL III.11
PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN.
DI KECAMATAN KERTEK TAHUN 2007

NO	DESA	0-4 tahun			5-9 tahun			10-14 tahun			15-19 tahun			20-24 tahun			25-29 tahun		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	Sindupaten	173	181	354	174	177	351	158	183	341	162	161	323	158	151	309	123	153	276
2	Surengede	166	169	335	163	145	308	182	162	344	184	165	349	136	116	252	147	140	287
3	Bojasari	139	126	265	161	152	313	156	160	316	149	115	264	89	94	183	105	120	225
4	Kertek	297	328	625	334	341	675	406	334	740	364	373	737	325	326	651	297	298	595
5	Sumberdalem	135	158	293	159	163	322	169	172	341	179	176	355	152	169	321	156	129	285
6	Purwojati	202	212	414	232	241	473	206	207	413	179	179	358	184	162	346	169	152	321
7	Karangluhur	241	254	495	283	268	551	307	272	579	270	230	500	208	241	449	193	184	377
8	Ngadikusuma	128	125	253	186	165	351	185	144	329	154	113	267	124	108	232	132	130	262
9	Wringinanom	101	99	200	131	125	256	103	117	220	118	97	215	82	92	174	79	105	184
10	Sudungdewo	159	163	322	170	175	345	176	182	358	190	136	326	124	112	236	106	114	220
11	Bejiarum	155	126	281	133	167	300	152	144	296	158	102	260	142	130	272	121	142	263
12	Damarkasian	130	138	268	134	141	275	125	117	242	133	132	265	131	110	241	119	119	238
13	Banjar	67	57	124	88	72	160	80	75	155	68	57	125	60	65	125	43	60	103
14	Tlogodalem	99	103	202	128	99	227	110	98	208	113	89	202	104	97	201	72	72	144
15	Tlogomulyo	78	72	150	87	88	175	82	67	149	80	75	155	80	78	158	84	68	152
16	Pagerejo	245	261	506	294	246	540	266	283	549	240	241	481	212	195	407	187	251	438
17	Candimulyo	261	274	535	300	290	590	283	300	583	303	298	601	231	244	475	235	189	424
18	Purbosono	95	115	210	156	133	289	173	136	309	152	163	315	137	115	252	109	109	218
19	Candiyasan	191	182	373	202	193	395	199	194	393	224	219	443	224	180	404	181	149	330
20	Kapencar	268	226	494	301	253	554	286	251	537	299	266	565	254	246	500	248	239	487
21	Reco	322	314	636	308	324	632	302	323	625	340	352	692	376	361	737	326	339	665
		3,652	3,683	7,335	4,124	3,958	8,082	4,106	3,921	8,027	4,059	3,739	7,798	3,533	3,392	6,925	3,232	3,262	6,494

Sumber: Kecamatan Kertek dalam angka tahun 2007

3.2.2.3. Pendidikan

Penduduk usia sekolah di Kecamatan Kertek di kelompokkan menjadi empat kelompok umur yaitu: 4-6 tahun untuk TK, 7-12 tahun untuk SD, 13-15 tahun untuk SLTP, 16-18 tahun untuk SLTA dan 19-24 tahun untuk Perguruan Tinggi. Sedangkan sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Kertek meliputi SD/MI sebanyak 43, SLTP/MTs sebanyak 5 dan SLTA sebanyak 1.

TABEL III.12
BANYAKNYA SARANA PENDIDIKAN SLTP, SLTA
JUMLAH MURID DAN JUMLAH GURU
KECAMATAN KERTEK TAHUN 2007

NO	DESA	SLTP/MTS			SLTA		
		sekolah	murid	guru	sekolah	murid	guru
1	Sindupaten	-	-	-	-	-	-
2	Surengede	-	-	-	-	-	-
3	Bojasari	-	-	-	1	401	43
4	Kertek	2	662	45	-	-	-
5	Sumberdalem	-	-	-	-	-	-
6	Purwojati	-	-	-	-	-	-
7	Karangluhur	1	727	41	-	-	-
8	Ngadikusuman	-	-	-	-	-	-
9	Wringinanom	1	504	25	-	-	-
10	Sudungdewo	-	-	-	-	-	-
11	Bejiarum	-	-	-	-	-	-
12	Damarkasian	-	-	-	-	-	-
13	Banjar	-	-	-	-	-	-
14	Tlogodalem	-	-	-	-	-	-
15	Tlogomulyo	-	-	-	-	-	-
16	Pagerejo	-	-	-	-	-	-
17	Candimulyo	-	-	-	-	-	-
18	Purbosono	-	-	-	-	-	-
19	Candiyasan	-	-	-	-	-	-
20	Kapencar	-	-	-	-	-	-
21	Reco	1	560	32	-	-	-
		5	2453	143	1	401	43

Sumber: Kecamatan Kertek dalam angka tahun 2007

3.2.2.4. Banyaknya siswa SLTP dan SLTA di Kecamatan Kertek

Banyaknya siswa antara satu sekolah dengan sekolah lain akan berbedabeda, hal ini bergantung dengan daya tampung sekolah. Makin banyak ruang kelas yang dimiliki maka daya tampung sekolah tersebut menjadi makin besar. Tetapi selain banyaknya ruang kelas yang dimiliki, jumlah siswa dalam suatu sekolah juga akan bisa berbeda tiap tahunnya. Faktor yang menyebabkan perbedaan jumlah siswa tiap tahun ini antara lain meliputi angka putus sekolah, angka melanjutkan dan juga minat masyarakat terhadap suatu sekolah.

TABEL III.13
BANYAKNYA SISWA SLTP DAN SLTA
SELAMA TIGA TAHUN TERAKHIR
KECAMATAN KERTEK TAHUN 2007

SMP N 1 KERTEK									
Tahun Pelajaran	Pend aftar Siswa baru	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		Jumlah	
		Jml siswa	Banyak Kelas	Jml siswa	Banyak Kelas	Jml siswa	Banyak Kelas	Jml siswa	Banyak Kelas
2006/2007	440	279	7	227	6	228	6	734	19
2007/2008	504	245	6	263	6	225	6	698	18
2008/2009	532	252	6	238	6	256	6	746	18
SMP N 2 KERTEK									
Tahun Pelajaran	Pend aftar Siswa baru	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		Jumlah	
		Jml siswa	Banyak Kelas	Jml siswa	Banyak Kelas	Jml siswa	Banyak Kelas	Jml siswa	Banyak Kelas
2006/2007	239	198	5	176	5	138	4	512	14
2007/2008	245	211	6	187	5	167	5	565	16
2008/2009	320	288	7	193	5	171	5	652	17
SMP N 3 KERTEK									

Tahun Pelajaran	Pend aftar Siswa baru	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		Jumlah	
		Jml siswa	Banyak Kelas	Jml siswa	Banyak Kelas	Jml siswa	Banyak Kelas	Jml siswa	Banyak Kelas
2006/2007	213	190	5	165	4	179	5	534	14
2007/2008	210	181	4	180	5	146	4	507	13
2008/2009	209	180	5	158	4	162	4	500	13

Lanjutan

SMP N MUHAMMADIYAH KERTEK									
Tahun Pelajaran	Pend aftar Siswa baru	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		Jumlah	
		Jml siswa	Banyak Kelas	Jml siswa	Banyak Kelas	Jml siswa	Banyak Kelas	Jml siswa	Banyak Kelas
2006/2007	95	79	2	79	2	78	2	236	6
2007/2008	89	80	2	78	2	77	2	235	6
2008/2009	105	100	3	80	2	74	2	254	7
MTS MA'ARIF KERTEK									
Tahun Pelajaran	Pend aftar Siswa baru	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		Jumlah	
		Jml siswa	Banyak Kelas	Jml siswa	Banyak Kelas	Jml siswa	Banyak Kelas	Jml siswa	Banyak Kelas
2006/2007	213	151	4	166	4	161	4	478	12
2007/2008	210	139	4	145	4	152	4	436	12
2008/2009	198	148	4	135	4	144	4	427	12
SMA N I KERTEK									
Tahun Pelajaran	Pend aftar Siswa baru	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		Jumlah	
		Jml siswa	Banyak Kelas	Jml siswa	Banyak Kelas	Jml siswa	Banyak Kelas	Jml siswa	Banyak Kelas
2006/2007	210	180	5	181	5	165	5	526	15

7									
2007/2008	193	178	5	153	5	174	5	505	15
2008/2009	94	80	4	138	5	142	5	360	14

Sumber : profil SLTP dan SLTA di Kecamatan Kertek tahun 2008

BAB IV **ANALISA KEBUTUHAN SEKOLAH MENENGAH**

Analisa kebutuhan sekolah menengah dilakukan untuk mengkaji kebutuhan sekolah menengah didasarkan pada kebutuhan nyata akan sekolah menengah tersebut. Kebutuhan akan sekolah menengah dikaji dari faktor ketersediaan, permintaan dan juga dilihat dari kebijakan pemerintah.

Ketersediaan akan sekolah menengah meliputi gambaran umum sekolah menengah yang ada berupa ketersediaan ruang kelas, daya tampung dan jangkauan sekolah. Sedangkan permintaan akan sekolah menengah bisa dilihat dari banyaknya penduduk usia sekolah menengah dan minat siswa dalam memilih sekolah menengah. Kebijakan pemerintah dapat dilihat dari rencana strategis dan standar pendirian sekolah menengah. Penentuan lokasi sekolah agar bisa dimanfaatkan secara optimal dilakukan dengan mengacu pada Pereturan Menteri Pendidikan Nasional no 24 tahun 2007 bahwa sekolah menengah harus mudah di akses, aman nyaman untuk pembelajaran, pada lokasi yang diperuntukkan bagi pendirian sekolah dan adanya penduduk usia sekolah yang cukup pada lokasi tersebut.

4.7. GAMBARAN UMUM SEKOLAH MENENGAH YANG ADA

Gambaran umum sekolah menengah dimaksudkan untuk melihat ketersediaan sekolah menengah yang ada di Kecamatan Kertek. Gambaran umum ini meliputi ketersediaan ruang kelas untuk proses pembelajaran, daya tampung sekolah dan jangkauan pelayanan sekolah.

1.8.1. Ketersediaan Ruang Kelas

Ruang kelas adalah tempat pembelajaran teori dan praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus atau praktik dengan alat khusus yang mudah dihadirkan (Permendiknas 24 tahun 2007). Ketersediaan ruang kelas yang ada di SMA Negeri I Kertek sebanyak 15 ruang kelas. Keseluruhan ruang kelas ini

dalam kondisi baik dan bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Kondisi ruang kelas yang masih baik ini tidak lepas dari perawatan dan usia sekolah yang masih relatif baru karena sekolah ini baru mulai digunakan pada bulan Maret tahun 2000.

Perkembangan SMA Negeri I Kertek bisa dilihat dari makin bertambahnya jumlah ruang kelas. Pada awalnya tahun 1999 ruang kelas yang tersedia hanya 9 ruang kelas, tetapi dengan makin berkembangnya jumlah siswa maka makin berkembang pula jumlah ruang kelas yang dibutuhkan. Sampai saat ini ruang kelas yang tersedia ada 15 ruang dan yang digunakan proses belajar mengajar sebanyak 14 ruang kelas karena jumlah siswa yang makin menurun.

Ruang kelas yang tersedia semuanya sudah dilengkapi dengan perabotan ataupun peralatan yang disesuaikan dengan permendiknas no 24 tahun 2007 tentang standar sarana prasarana sekolah menengah, meliputi perabot dan alat bantu pembelajaran lainnya.

Dengan luas lahan yang dimiliki hanya 9.800 m² maka penambahan ruang kelas atau bangunan lainnya tidak mungkin dilakukan. Karena keterbatasan lahan ini maka pembangunan atau penambahan ruang kelas hanya bisa dilakukan dengan bangunan bertingkat.

TABEL IV.1
KETERSEDIAAN RUANG KELAS DAN RUANG LAINNYA
SMA NEGERI I KERTEK TAHUN PELAJARAN 2008-2009

No.	Jenis Ruang	Milik					
		Baik		Rusak Ringan		Rusak Berat	
		Jml	Luas (m ²)	Jml	Luas (m ²)	Jml	Luas (m ²)
1.	Ruang Teori/Kelas	15	1.080	-	-	-	-
2.	Laboratorium Kimia	1	120	-	-	-	-

3.	Laboratorium Fisika	1	120	-	-	-	-
4.	Laboratorium Bahasa	1	120	-	-	-	-
5.	Laboratorium Komputer	2	152	-	-	-	-
6.	Ruang Perpustakaan	1	144	-	-	-	-
7.	Ruang Keterampilan	1	72	-	-	-	-
8.	Ruang UKS	1	18	-	-	-	-
9	Koperasi / Toko	4	60	-	-	-	-
10	Ruang BP / BK	1	24	-	-	-	-
11	Ruang Kepala Sekolah	1	44	-	-	-	-
12	Ruang Guru	1	46	-	-	-	-
13	Ruang TU	1	50	-	-	-	-
14	Ruang OSIS	1	24	-	-	-	-
15	Kamar Mandi / WC Guru	3	24	-	-	-	-
16	Kamar Mandi / WC Siswa	6	54	-	-	-	-
17	Gudang	2	12	-	-	-	-
18.	Ruang Ibadah	1	64	-	-	-	-

Sumber: Profil SMA N I Kertek 2008

1.8.2. Daya Tampung Sekolah

Daya tampung sekolah adalah banyaknya siswa maksimal yang bisa mengikuti proses belajar mengajar dalam suatu sekolah. Daya tampung ini bisa dilihat dari ketersediaan ruang kelas dikalikan dengan jumlah peserta maksimum tiap kelas.

Jumlah peserta didik maksimum tiap kelas sesuai permendiknas no 24 tahun 2007 adalah 32 siswa dengan ketersediaan ruang kelas yang ada sebanyak 15 ruang kelas maka daya tampung SMA Negeri I Kertek sebanyak 480 siswa.

Dengan daya tampung sejumlah 480 siswa, tahun pelajaran 2006-2007 dan 2007-2008 jumlah siswa SMA N I Kertek melebihi daya tampung yang ditentukan. Kelebihan daya tampung ini dikarenakan tingginya minat siswa untuk memilih SMA Negeri I Kertek.

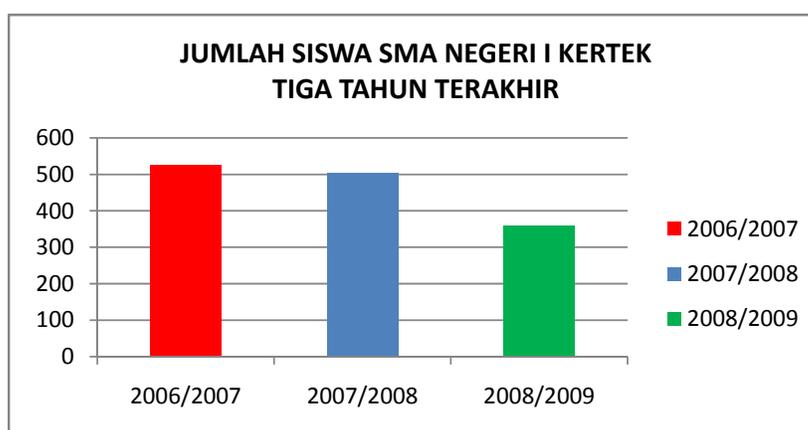
TABEL IV.2

**DATA SISWA TIGA TAHUN TERAKHIR
SMA NEGERI I KERTEK**

Tahun	Siswa baru	Kelas VII		Kelas VII		Kelas VII		Jumlah	
		siswa	Kelas	siswa	Kelas	siswa	Kelas	siswa	Kelas
2006/2007	210	180	5	181	5	165	5	526	15
2007/2008	193	178	5	153	5	174	5	505	15
2008/2009	94	80	4	138	5	142	5	360	14

Sumber Profil SMA N I Kertek 2008

Kondisi ini sangat berbeda dengan tahun pelajaran 2008-2009 dimana jumlah siswa seluruhnya hanya 360 siswa, hal ini menunjukkan jumlah siswa di SMA Negeri I Kertek kurang jika dibandingkan daya tampung yang tersedia. Kekurangan ini bisa disebabkan beberapa faktor, tetapi paling dominan adalah tingginya minat lulusan SLTP untuk melanjutkan ke sekolah kejuruan. Hal ini bisa dilihat dari tingginya pendaftar siswa baru di sekolah menengah kejuruan yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan berkebalikan dengan pendaftar siswa baru di sekolah menengah umum yang cenderung terus menurun.



Sumber : Analisis 2009

**GAMBAR. 4.1
JUMLAH SISWA SMA NEGERI I KERTEK TIGA TAHUN TERAKHIR**

Dengan 360 siswa dan ketersediaan ruang kelas 15 ruang maka rasio siswa perkelas adalah 24. Hal ini masih berada dibawah standar maksimal rasio siswa perkelas yang ditetapkan sebanyak 32 siswa. Dengan rasio jumlah siswa per kelas yang berada dibawah rasio yang ditetapkan, secara kualitas proses pembelajaran akan dapat dilakukan dengan lebih baik.

TABEL IV.3
DATA SISWA MENURUT KELOMPOK UMUR
SMA NEGERI I KERTEK TAHUN 2008-2009

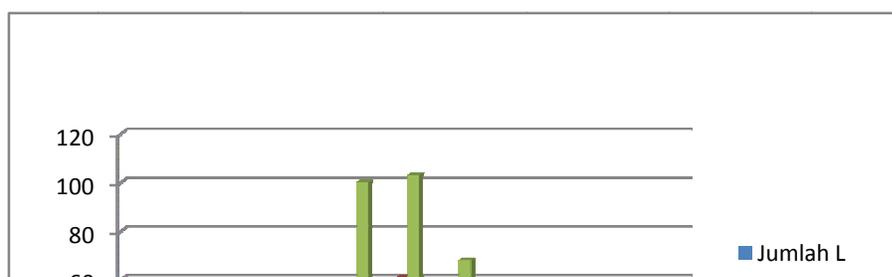
Umur	Tingkat I		Tingkat II		Tingkat III		Jumlah		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L + P
14 tahun	2	7					2	7	9
15 tahun	20	24	1	8			21	32	53

lanjutan

Umur	Tingkat I		Tingkat II		Tingkat III		Jumlah		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L + P
16 tahun	24	21	21	32	1	1	46	54	100
17 tahun	11	6	24	26	7	29	42	61	103
18 tahun	4	1	16	2	19	26	39	29	68
19 tahun	4		4	1	10	4	18	5	23
20 tahun					1	3	1	3	4
Jumlah 3)	65	59	66	69	38	63	169	191	360

Sumber: Profil SMA N I Kertek 2008

Jumlah siswa SMA Negeri I Kertek terbagi menjadi beberapa kelompok umur dengan rentang antara 14 tahun sampai dengan 20 tahun. Jumlah ini terbanyak ada pada usia 16, 17 dan 18 tahun sesuai dengan usia siswa sekolah menengah.



Sumber : Analisis 2009

GAMBAR. 4.2
JUMLAH SISWA MENURUT KELOMPOK UMUR
SMA NEGERI I KERTEK TAHUN 2008-2009

1.8.3. Jangkauan Sekolah

Sesuai dengan Standar Nasional Indonesia no 03-1733 tahun 2004 jangkauan pelayanan sekolah menengah sejauh radius 3000 meter pada jalur mendatar. Tetapi siswa SMA Negeri I Kertek ada yang berasal dari luar jangkauan pelayanan sekolah tersebut, bahkan ada beberapa siswa yang berasal dari luar Kabupaten Wonosobo.

Alasan yang dikemukakan dari siswa kenapa memilih SMA Negeri I Kertek antara lain mengikuti saudara atau tetangga yang sebelumnya pernah sekolah di SMA Negeri I Kertek, selain itu mereka menganggap bahwa transpot menuju sekolah lebih mudah walaupun jaraknya lebih jauh. Hal ini tak lepas dari lokasi SMA Negeri I Kertek yang memang mudah dijangkau dari berbagai jurusan karena terletak dekat jalan kolektor yang dilewati berbagai trayek angkutan umum.

TABEL IV.4
SISWA DARI LUAR KECAMATAN KERTEK

SMA NEGERI I KERTEK TAHUN 2008-2009

NO	NAMA	ASAL SISWA	JARAK KE SEKOLAH
1	Dwi Setyawan	Kalikarung, Kecamatan Kalibawang	14,2 km
2	Aditya Candra	Sumpet , Kecamatan Kepil	16,3 km
3	Arif Syaban	Sidorejo, Kec Parakan, Kabupaten Temanggung	22,0 km
4	Basir Nurhayat	Tegalsari, Kecamatan Garung	12,7 km
5	Erlina Rinandi	Kledung, Kec Kledung Kabupaten Temanggung	18,1 km
6	Kariyaman	Bowongso, Kecamatan Kalikajar	8,2 km
7	Dwi Nurhayati	Lamuk, Kecamatan Kalikajar	6,5 km
8	Riris Perdani	Sojokerto, Kecamatan Leksono	9,1 km
9	Ryan Indra P	Kledung, Kec Kledung Kabupaten Temanggung	18,1 km
10	Yohanes Catur	Kadipaten, Kecamatan Selomerto	5,1 km
11	Eko Homsatun	Tegalombo, Kecamatan Kalikajar	3,7 km
12	Anang Suyuti	Guntur Madu, Kecamatan Mojotengah	10,9 km
13	Anik Riyanti	Timbang, Kecamatan Lekosono	8,1 km
14	Dina Mariana	Bumen, Kecamatan Mojotengah	11,8 km
15	Eni Rahmawati	Simbarejo, Kecamatan Selomerto	6,5 km
16	Erna Nugraheni	Sojokerto, Kecamatan Leksono	9,1 km

Sumber: Profil SMA N I Kertek 2008

4.8. ANALISA PENDUDUK USIA SEKOLAH, PROYEKSI SISWA, KEBUTUHAN RUANG KELAS DAN KEBUTUHAN SEKOLAH MENENGAH

1.7.4. Pemecahan Penduduk Lima Tahunan

Pemecahan penduduk lima tahunan dilakukan dengan terlebih dahulu dengan menentukan jumlah penduduk menurut kelompok umur. Jumlah penduduk menurut kelompok umur yang ada baru sampai tahun 2007, maka untuk mencari jumlah penduduk tahun 2008 dan penduduk tahun 2009 bisa digunakan angka pertumbuhan penduduk dan proyeksi penduduk.

Angka pertumbuhan penduduk adalah kenaikan jumlah penduduk tiap tahunnya. Angka pertumbuhan penduduk ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AP_n = \frac{S_{n-1} - S_{n-2}}{S_{n-2}} \times 100\%$$

Keterangan:

AP_n	=	Angka pertumbuhan penduduk tahun ke - n
S_{n-1}	=	Penduduk tahun ke n - 1
S_{n-2}	=	Penduduk tahun ke n - 2

Proyeksi jumlah penduduk dihitung dengan menggunakan rumus :

$$PUS_n = PUS_{n-1} X \left\{ 1 + \left(\frac{APPUS_{n-1}}{100} \right) \right\}$$

Keterangan:

PUS_n = Proyeksi penduduk tahun ke - n

PUS_{n-1} = Penduduk tahun ke n - 1

$APPUS_{n-1}$ = Angka pertumbuhan penduduk tahun ke n-1 sampai ke n - 2

Proyeksi penduduk usia sekolah menengah di Kecamatan Kertek tahun 2009 dapat digunakan untuk menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah menengah di setiap desa. Dengan banyaknya penduduk usia sekolah menengah maka akan dapat digunakan sebagai acuan dalam pembangunan sarana pendidikan.

TABEL IV.5
DATA DAN PROYEKSI PENDUDUK USIA SEKOLAH MENENGAH
KECAMATAN KERTEK TAHUN 2006-2009

NO	DESA	15-19 tahun		Proyeksi usia 15-19 tahun		
		2006	2007	Pertumbuhan	2008	2009
1	Sindupaten	320	323	0,94%	326	329
2	Surengede	347	349	0,58%	351	353
3	Bojasari	263	264	0,38%	265	266
4	Kertek	732	737	0,68%	742	747
5	Sumberdalem	351	355	1,14%	359	363
6	Purwojati	356	358	0,56%	360	362
7	Karangluhur	493	500	1,42%	507	514
8	Ngadikusuman	265	267	0,75%	269	271
9	Wringinanom	211	215	1,90%	219	223
10	Sudungdewo	322	326	1,24%	330	334
11	Bejiarum	259	260	0,39%	261	262
12	Damarkasian	263	265	0,76%	267	269
13	Banjar	125	125	0,00%	125	125
14	Tlogodalem	200	202	1,00%	204	206
15	Tlogomulyo	155	155	0,00%	155	155
16	Pagerejo	478	481	0,63%	484	487
17	Candimulyo	597	601	0,67%	605	609
18	Purbosono	312	315	0,96%	318	321
19	Candiyasan	440	443	0,68%	446	449

20	Kapencar	562	565	0,53%	568	571
21	Reco	694	692	-0,29%	690	688
		7745	7798	0,68%	7.851	7.905

Sumber: Kecamatan dalam angka 2006,2007 dan hasil analisis 2009

Dengan menggunakan angka pertumbuhan dan proyeksi jumlah penduduk, diperoleh proyeksi penduduk menurut kelompok umur tahun 2008 dan 2009. Data ini akan digunakan untuk pemecahan penduduk lima tahunan. Dengan pemecahan penduduk lima tahunan menjadi penduduk tahunan maka akan dapat diketahui proyeksi penduduk usia sekolah (16-18 tahun).

TABEL IV.6
JUMLAH PENDUDUK DAN PROYEKSI PENDUDUK
KECAMATAN KERTEK TAHUN 2006-2009

PENDUDUK	DATA		PROYEKSI		
	2006	2007	PERTUMBUHAN	2008	2009
0-4	7.271	7.335	0,88%	7.400	7.465
5-9	8.023	8.082	0,74%	8.141	8.201
10-14	7.951	8.027	0,96%	8.104	8.181
15-19	7.745	7.798	0,68%	7.851	7.905
20-24	6.873	6.925	0,76%	6.977	7.030
25-29	6.442	6.494	0,81%	6.546	6.599
JUMLAH	44.305	44.661	0,80%	45.020	45.382

Sumber: Kecamatan dalam angka 2006,2007 dan hasil analisis 2009

Selain proyeksi penduduk menurut kelompok umur tahun 2009, maka dalam menghitung pemecahan penduduk tahunan ini juga menggunakan tabel Spraque.

TABEL IV.7
TABEL SPRAQUE UNTUK PEMECAHAN PENDUDUK TAHUNAN
USIA 10-14 SAMPAI 70-74

Tabel	Usia	F-3	F-2	F-1	F-0	F1	F2	F3
10-14 tahun	Fa	-	-0,0128	0,0848	0,1504	-0,024	0,0016	-
s.d	Fb	-	-0,0016	0,0144	0,2224	-0,0416	0,0064	-

70-74 tahun	Fc	-	0,0064	-0,0336	0,2544	-0,0336	0,0064	-
	Fd	-	0,0004	-0,0416	0,2224	0,0144	-0,0016	-
	Fe	-	0,0016	-0,024	0,1504	0,0848	-0,0128	-

Sumber : Usman, 2006. *Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*

Rumus yang digunakan dalam pemecahan penduduk lima tahunan usia 10-14 s.d 70-74 adalah sebagai berikut

$$Fa = (S1a \times F_{-2}) + (S2a \times F_{-1}) + (S3a \times F_0) + (S4a \times F_1) + (S5a \times F_2)$$

Dengan menggunakan rumus tersebut, bisa dihitung penduduk usia sekolah menengah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Usia 16 tahun} &= (-0,0016 \times 8.201) + (0,0144 \times 8.181) + (0,2224 \times 7.905) + \\ &\quad (-0,0416 \times 7.030) + (0,0064 \times 6.599) \\ &= (-13,12) + (117,81) + (1.758,09) + (-292,46) + (42,24) \\ &= 1.612,56 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Usia 17 tahun} &= (0,0064 \times 8.201) + (-0,0336 \times 8.181) + (0,2544 \times 7.905) + \\ &\quad (-0,0336 \times 7.030) + (0,0064 \times 6.599) \\ &= (52,49) + (-274,89) + (2.011,06) + (-236,21) + (42,24) \\ &= 1.594,68 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Usia 18 tahun} &= (0,0004 \times 8.201) + (-0,0416 \times 8.181) + (0,2224 \times 7.905) + \\ &\quad (0,0144 \times 7.030) + (-0,0016 \times 6.599) \\ &= (3,28) + (-340,34) + (1.758,09) + (101,23) + (-10,56) \\ &= 1.511,71 \end{aligned}$$

Seperti dalam Usman (2006) disebutkan bahwa penduduk usia sekolah menengah adalah penduduk usia 16, 17 dan 18 tahun. Jadi jumlah penduduk usia sekolah menengah di Kecamatan Kertek tahun 2009 adalah

$$\begin{aligned} &= \text{usia 16 tahun} + \text{usia 17 tahun} + \text{usia 18 tahun} \\ &= 1.612,56 + 1.594,68 + 1.511,71 \\ &= 4.718,95 \end{aligned}$$

$$= 4.719$$

1.7.5. **Proyeksi Siswa**

Proyeksi siswa dihitung berdasarkan target yang ditentukan yaitu disesuaikan dengan target APK rata rata kabupaten. APK rata rata kabupaten dihitung berdasarkan kecenderungan kenaikan APK .

Proyeksi APK ini dihitung karena data APK yang ada hanya baru sampai APK tahun 2008. Perhitungan proyeksi APK ini menggunakan angka pertumbuhan dan proyeksi seperti pada proyeksi jumlah penduduk.

<i>Data APK 2007</i>		28,48
<i>Data APK 2008</i>		30,54
<i>Pertumbuhan APK</i>	=	$((30,54-28,48)/28,48) \times 100\%$
	=	7,2 %
<i>Proyeksi APK 2009</i>	=	$30,54 \times (1 + 7,2\%)$
	=	32,75

Dengan penduduk usia sekolah menengah tahun 2009 untuk kecamatan Kertek sejumlah 4.719 dan asumsi APK Kecamatan Kertek sama dengan proyeksi APK rata rata kabupaten Wonosobo 32,75%, maka dapat diproyeksikan siswa sekolah menengah di Kecamatan Kertek tahun 2009 adalah

$$= 4.719 \times 32,75\%$$

$$= 1.545 \text{ siswa}$$

1.7.6. **Proyeksi Kebutuhan Ruang Kelas dan Kebutuhan Sekolah Menengah**

a. Proyeksi kebutuhan ruang kelas berdasarkan perhitungan

Proyeksi kebutuhan ruang kelas berdasarkan perhitungan dianggap lebih tepat karena akan dapat melihat kebutuhan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Proyeksi ini didasarkan pada jumlah penduduk usia sekolah menengah.

Proyeksi siswa sekolah menengah di Kecamatan Kertek sejumlah 1.545 siswa serta rasio siswa perkelas sebanyak 32 dan rasio kelas per ruang kelas atau banyaknya ruang kelas yang tersedia dibandingkan banyaknya kelas sebesar 15/14 atau 1,09 maka dapat ditentukan kebutuhan ruang kelas seluruhnya:

$$BRKt = \frac{PSt}{\left(\frac{S}{K}\right) \times \left(\frac{K}{RK}\right)} - (RKL + RKS)$$

Keterangan:

- BRKt = Jumlah kebutuhan ruang kelas seluruhnya tahun ke t
 PSt = Proyeksi siswa pada tahun t
 (S/K) = Rasio siswa perkelas
 (K/RK) = Rasio kelas per ruang kelas
 RKL = Jumlah ruang kelas lama yang sudah ada
 RKS = Jumlah ruang kelas yang sedang dibangun atau yang telah dibangun tetapi belum digunakan.

$$BRKt = \frac{PSt}{\left(\frac{S}{K}\right) \times \left(\frac{K}{RK}\right)} - (RKL + RKS)$$

$$BRKt = \frac{1.545}{32 \times 1,09} - (15 + 0)$$

$$BRKt = \frac{1.545}{34,88} - (15)$$

$$BRKt = 44,29 - (15)$$

$$BRKt = 29,29$$

Jadi kebutuhan ruang kelas seluruhnya adalah 44,29 ruang atau dibulatkan menjadi 45 ruang kelas, ketersediaan ruang kelas yang ada sejumlah 15 ruang kelas jadi kekurangan ruang kelas sejumlah 30 ruang kelas.

b. Proyeksi kebutuhan ruang kelas berdasarkan aspek normatif

Proyeksi kebutuhan ruang kelas berdasarkan aspek normatif mendasarkan pada aturan atau standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyeksi ini dianggap kurang mendekati pada keadaan kebutuhan sesungguhnya karena hanya didasarkan pada jumlah penduduk tanpa melihat komposisi penduduk menurut kelompok umur ataupun penduduk usia sekolah. Berdasarkan aspek normatif maka dibutuhkan data penduduk Kecamatan Kertek .

**TABEL IV.8
DATA DAN PROYEKSI PENDUDUK KECAMATAN KERTEK**

PENDUDUK	DATA		PROYEKSI		
	2006	2007	PERTUMBUHAN	2008	2009
	75.747	76.330	0,77%	76.917	77.509

Sumber: Kecamatan dalam angka 2006,2007 dan hasil analisis 2009

Dengan data penduduk tahun 2009 sejumlah 77.509 jiwa maka akan dapat dihitung kebutuhan sekolah menengah sesuai dengan aspek normatifnya sebagai berikut :

**TABEL IV.9
KEBUTUHAN SEKOLAH MENENGAH
DI KECAMATAN KERTEK TAHUN 2009
BERDASARKAN ASPEK NORMATIF**

NO	NORMATIF	STANDAR	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	KEKURANGAN
1	Kepmen Kimpraswi I no 534 tahun 2001 tentang standar minimal penataan ruang	1 sekolah menengah melayani 30.000 jiwa penduduk	77.509 = ----- 30.000 = 2,58 sekolah ≈ 3 sekolah	1 sekolah menengah	2 sekolah menengah

2	Permendiknas no 24 tahun 2007 tentang standar sarana prasaran	1 sekolah menengah dengan 3 rombongan belajar melayani 6.000 jiwa penduduk	$\frac{77.509}{6.000} = 12,91 \approx 13$ Dengan banyak ruang kelas $= 13 \times 3 = 39 \text{ ruang kelas}$	1 sekolah menengah dengan 15 ruang kelas	24 ruang kelas
3	SNI 03 1733 2004	1 sekolah menengah melayani 4.800 jiwa penduduk	$\frac{77.509}{4.800} = 16,14 \approx 16 \text{ sekolah}$	1 sekolah menengah	15 sekolah menengah

Sumber: Kecamatan dalam angka 2006,2007 dan hasil analisis 2009

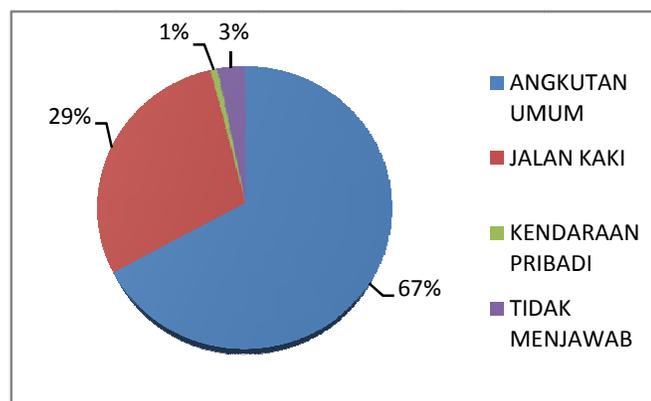
Terdapat perbedaan yang cukup besar hasil yang diperoleh dalam menentukan kebutuhan sekolah menengah dengan menggunakan perhitungan dan aspek normatif yang ada. Dengan perhitungan lebih dipilih sebagai acuan karena mendekati kenyataan yang didasarkan pada jumlah siswa usia sekolah, sedangkan aspek normatif kurang mendekati kebutuhan karena didasarkan pada jumlah penduduk tanpa memperhatikan penduduk kelompok umur ataupun jumlah siswa usia sekolah menengah yang ada.

4.9. ANALISA MINAT LULUSAN SLTP UNTUK MELANJUTKAN KE SEKOLAH MENENGAH

Untuk mengetahui minat lulusan SLTP dalam memilih sekolah menengah, maka telah diambil data primer melalui angket yang diisi oleh siswa

kelas IX SLTP se Kecamatan Kertek tahun Pelajaran 2008-2009. Sampel yang diambil sebanyak 260 siswa dan terdistribusi secara persentase dari siswa tiap sekolah.

Sampel terdiri dari 111 siswa laki laki dan 149 siswa perempuan. Rata rata jarak ke sekolah adalah 5,6 km dengan rata rata waktu tempuh 32,8 menit. Alat angkutan umum merupakan sarana transportasi siswa untuk menuju sekolah dengan angkutan umum sebanyak 67%, jalan kaki 29%, kendaraan pribadi 1% dan tidak menjawab 3%. Besarnya alat angkutan umum yang digunakan karena siswa SLTP masih berada pada usia dibawah 17 tahun sehingga mereka belum diperbolehkan untuk menggunakan kendaraan pribadi. Adanya siswa yang menggunakan kendaraan pribadi dikarenakan siswa tersebut diantar oleh orang tuanya untuk datang di sekolah.

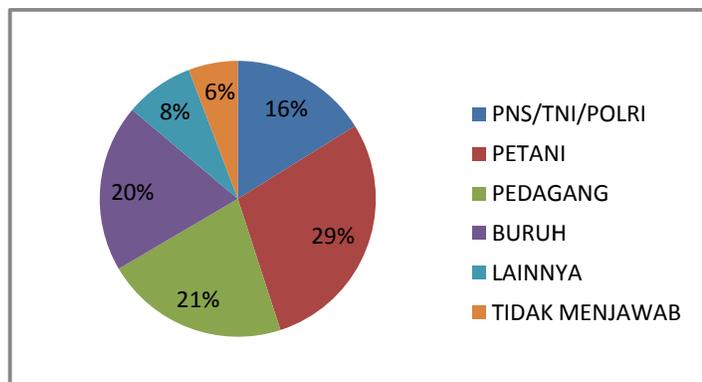


Sumber : Analisis 2009

GAMBAR. 4.6
ALAT TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN

Dari sampel yang diambil diketahui pula bahwa pekerjaan orang tua amat beragam dengan pembagian PNS/TNI/POLRI meliputi 16%, petani 29%, buruh

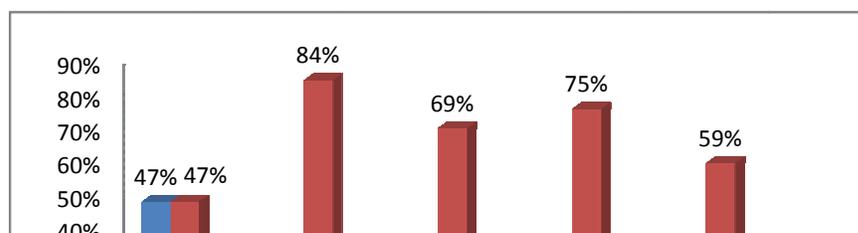
20%, pedagang 21%, lainnya 8% sedangkan 6% tidak menjawab.



Sumber : Analisis 2009

GAMBAR. 4.7
GRAFIK PEKERJAAN ORANG TUA

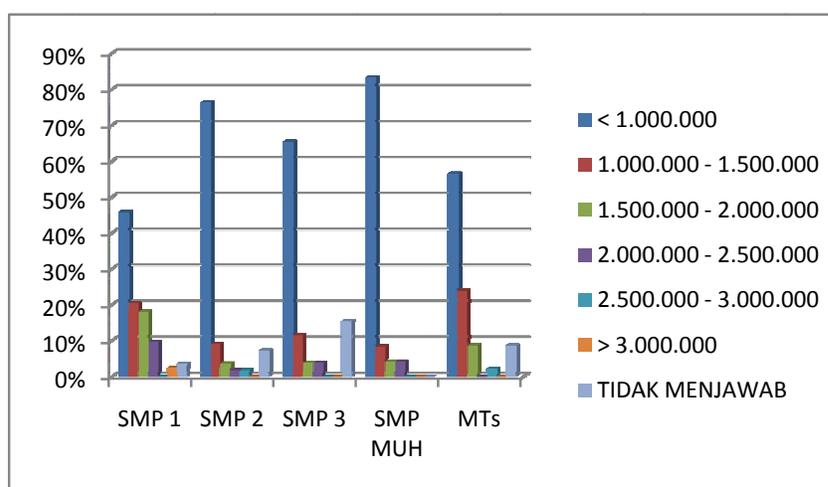
Hasil kuesioner yang diisi oleh siswa, terdapat ciri khas antar satu sekolah dengan sekolah lainnya. Salah satu yang paling menonjol adalah pemilihan jenis sekolah menengah dimana SMP N 1 Kertek siswa yang memilih SMK dan SMA masing masing sama yaitu 39 siswa, sedangkan di sekolah lain terdapat kecenderungan yang menyolok bahwa SMK lebih diminati dari SMA. Kondisi ini bisa dipahami karena SMP N 1 Kertek merupakan salah satu sekolah unggulan di Kecamatan Kertek dimana siswanya cenderung untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi sehingga mereka masih banyak juga yang memilih SMA. Berbeda dengan sekolah lainnya yang lebih banyak memilih SMK dengan alasan ingin punya keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari pekerjaan jika mereka tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi.



Sumber : Analisis 2009

GAMBAR. 4.8
GRAFIK MINAT SISWA TIAP SEKOLAH
MEMILIH SEKOLAH MENENGAH

Minat pemilihan jenis sekolah menengah ini tidak lepas dari tingkat penghasilan orang tua siswa SMP N 1 Kertek dimana 18% berpenghasilan antara Rp. 1.500.000,- sampai Rp. 2.000.000,- dan 10% orang tua siswa berpenghasilan antara Rp. 2.000.000,- sampai Rp. 2.500.000,- serta 2% orang tua siswa berpenghasilan lebih dari Rp. 3.000.000,-. Hal ini berbeda dengan SLTP lainnya yang rata rata penghasilan orang tuanya kurang dari Rp.1.000.000,-

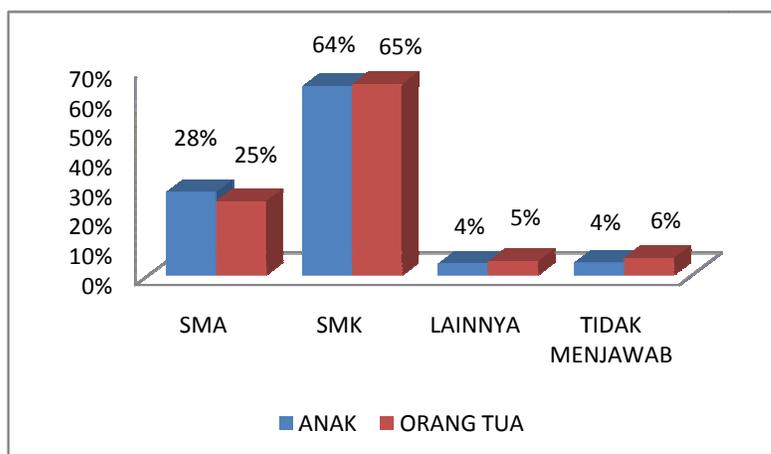


Sumber : Analisis 2009

GAMBAR. 4.9

GRAFIK PENGHASILAN ORANG TUA

Secara keseluruhan diketahui bahwa 81% siswa akan melanjutkan ke jenjang sekolah menengah dengan pilihan ke SMK 65%, SMA 25%. Pilihan ini juga hampir sama dengan pilihan orang tua yang memilih untuk menyekolahkan anaknya ke SMK sebanyak 64% dan ke SMA 28%. Pemilihan jenis sekolah kejuruan ini tidak lepas dari tingkat ekonomi orang tua siswa yang sebagian besar berpenghasilan dibawah Rp.1.000.000,- sehingga mereka menginginkan pendidikan yang dapat memberikan ketrampilan dalam waktu yang relatif cepat supaya bisa cepat bekerja dan mudah mencari pekerjaan.



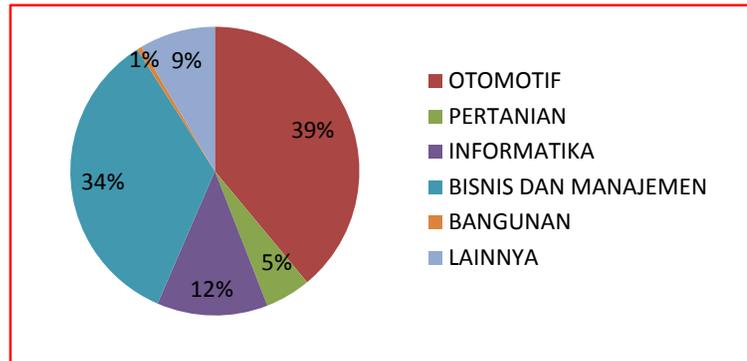
Sumber : Analisis 2009

GAMBAR 4.10
PILIHAN MELANJUTKAN KE SEKOLAH MENENGAH

Pemilihan jenis sekolah dan program studi di SMK maupun jurusan di SMA sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang bisa meliputi teman, guru, orang tua ataupun lainnya. Dari data diperoleh bahwa 57% siswa memilih sekolah

menengah atas masukan dari orang tua dan pilihan sendiri. Kenyataan ini tidak lepas bahwa secara usia siswa SLTP masih belum bisa sepenuhnya melakukan pilihan secara sendiri, jadi peran orang tua dalam mengarahkan anaknya untuk memilih sekolah menengah masih diperlukan.

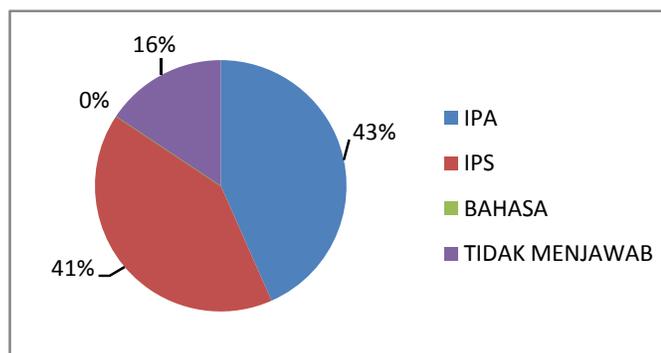
Siswa yang memilih melanjutkan pendidikan ke SMK 39% memilih program keahlian otomotif, 34% bisnis manajemen, 12% informatika, 5% pertanian, 1% bangunan dan 9% program keahlian lainnya.



Sumber : Analisis 2009

GAMBAR 4.11
PILIHAN PROGRAM KEAHLIAN DI SMK

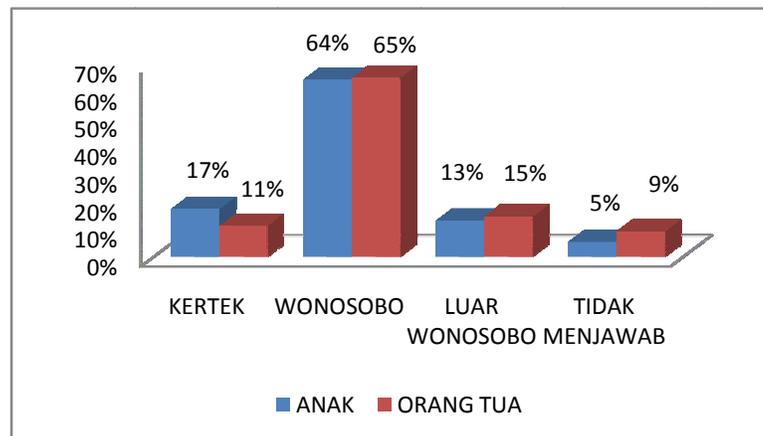
Sedangkan siswa yang memilih melanjutkan SMA 43% memilih jurusan IPA dan 41% memilih jurusan IPS.



Sumber : Analisis 2009

GAMBAR 4.12
PILIHAN JURUSAN DI SMA

Pilihan lokasi sekolah menengah yang diminati sebanyak 64% jawaban anak dan 65% jawaban orang tua memilih untuk memilih sekolah diluar Kecamatan Kertek tetapi masih di dalam Kabupaten Wonosobo, sedangkan sekolah menengah didalam kecamatan kertek diminati oleh 17% anak dan 11% orang tua, pilihan untuk melanjutkan sekolah menengah diluar Kabupaten Wonosobo dinyatakan oleh 13% anak dan 15% orang tua.

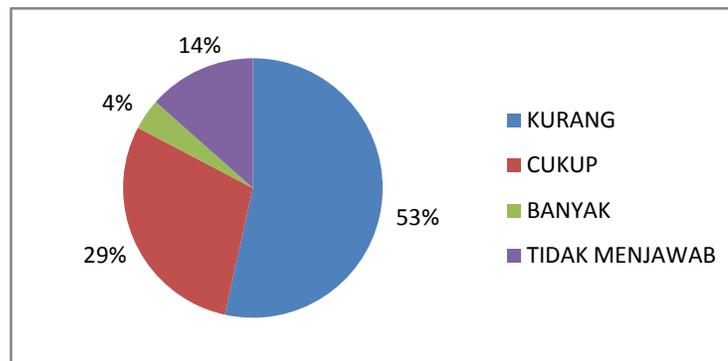


Sumber : Analisis 2009

GAMBAR 4.13
GRAFIK PILIHAN LOKASI SEKOLAH MENENGAH

Pemilihan lokasi sekolah yang sebagian besar diluar Kecamatan Kertek tetapi masih dalam lingkup Kabupaten Wonosobo ini disebabkan jarak antar Kecamatan Kertek dengan Kota Wonosobo yang terhitung masih dekat dan mudah dijangkau. Selain itu ketersediaan sekolah menengah di Kecamatan Kertek sampai saat ini masih tergolong kurang terutama Sekolah Menengah Kejuruan,

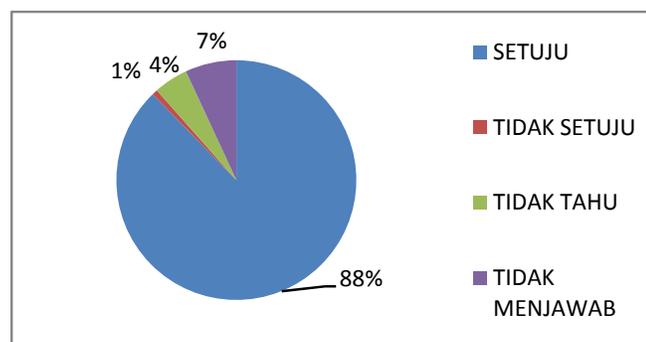
yang dikuatkan dari pendapat orang tua dengan 53% menyatakan bahwa sekolah menengah di Kecamatan Kertek masih kurang. Sementara 29% menyatakan sudah cukup, 4% menyatakan terlalu banyak, dan 14% responden tidak menjawab.



Sumber : Analisis 2009

GAMBAR 4.14
KEBERADAAN SEKOLAH MENENGAH DI KECAMATAN KERTEK

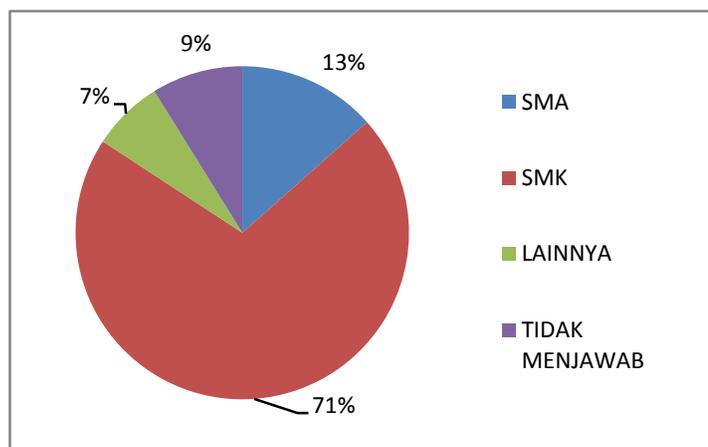
Kekurangan sekolah menengah ini sangat disetujui untuk dibangun yang dinyatakan oleh 88% orang tua dan hanya 1% yang menyatakan tidak setuju untuk ditambah.



Sumber : Analisis 2009

GAMBAR 4.15
GRAFIK PENDAPAT UNTUK DIBANGUN SEKOLAH MENENGAH
Penambahan sekolah menengah yang akan dibangun 71% memilih jenis

SMK dan hanya 13% yang memilih SMA.



Sumber : Analisis 2009

GAMBAR 4.16
PILIHAN JENIS SEKOLAH MENENGAH YANG AKAN DIBANGUN

Para orang tua lebih memilih lokasi sekolah menengah yang akan dibangun agar ditempatkan di desa atau kelurahan masing masing dengan alasan supaya lebih dekat dan hemat uang transpot. Selain itu beberapa orang tua juga beralasan supaya lebih mudah dalam pengawasan anaknya.

Dari saran, usul serta harapan para orang tua dapat disimpulkan bahwa mereka menginnginkan dibangun sekolah menengah yang dekat tempat tinggal sehingga mudah diakses sehinga lebih hemat dari biaya transportasi serta berharap agar biaya pendidikan murah dan terjangkau.

4.10. Analisa Jenis Sekolah Menengah

Jenis sekolah menengah terdiri dari pendidikan menengah umum yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan pendidikan kejuruan

merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Bentuk satuan pendidikannya adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Berdasarkan minat siswa diketahui bahwa 25% memilih melanjutkan ke SMA, 65% memilih melanjutkan ke SMK, 5% memilih lainnya dan 6% tidak menjawab. Sedangkan minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya diketahui bahwa 28% memilih melanjutkan ke SMA, 64% memilih melanjutkan ke SMK, 4% memilih lainnya dan 4% tidak menjawab.

Dari data ini bisa diamati bahwa SMK lebih diminati dari SMA atau Sekolah menengah lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan sekolah menengah berdasarkan minat masyarakat (siswa dan orang tua) lebih cenderung untuk jenis Sekolah Menengah Kejuruan.

Selain dari minat siswa yang diperoleh melalui kuesioner, kecenderungan makin diminatinya SMK juga bisa dilihat dari kecenderungan makin meningkatnya pendaftar saat penerimaan siswa baru, lain halnya yang terjadi di SMA adanya kecenderungan bahwa pendaftar siswa baru makin menurun.

Minat masyarakat ini sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk lebih memperbanyak SMK dibandingkan SMA, bahkan samapai tahun 2015 ditargetkan perbandingan antar SMK dengan SMA sampai pada angka 70:30.

Jika dilihat dari program studi SMK yang paling diminati adalah otomotif 39%, bisnis manajemen 34%, informatika 12%, pertanian 5%, lainnya 9% dan bangunan 1%. Maka untuk penentuan jenis program studi SMK yang diutamakan berdasarkan minat siswa adalah otomotif serta bisnis manajemen.

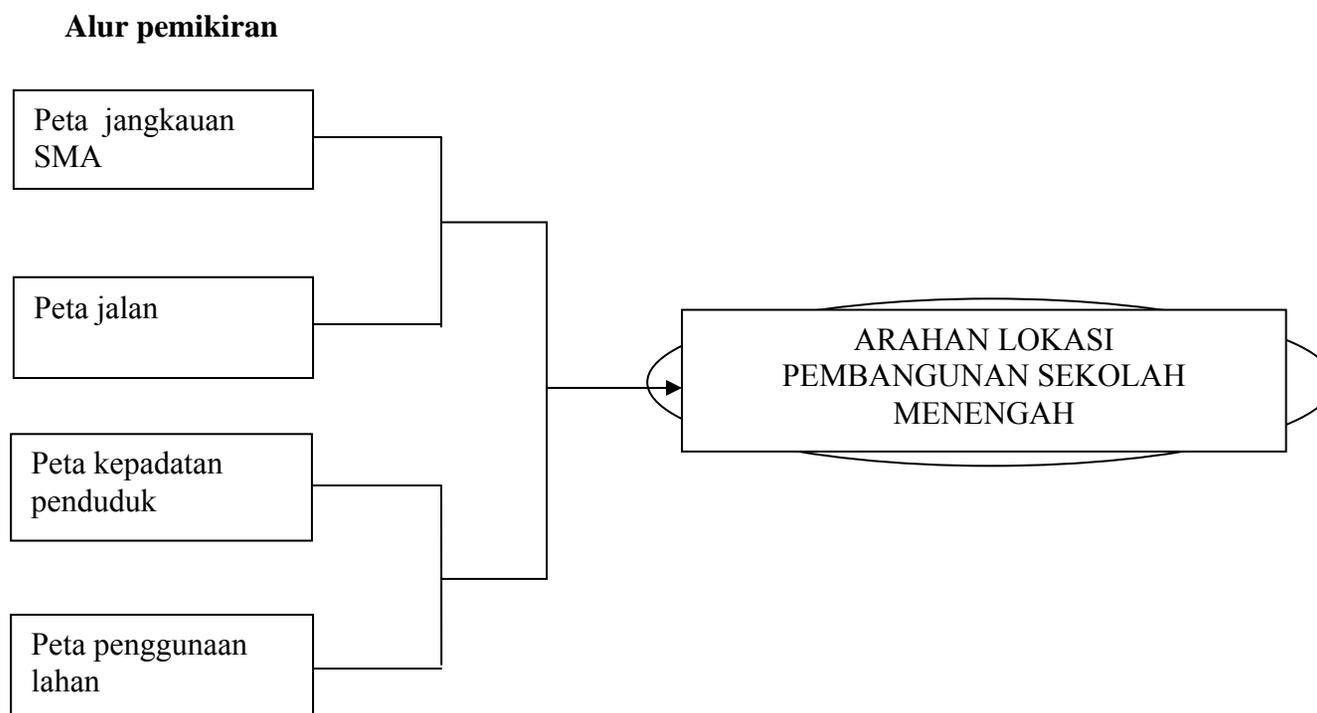
Tetapi penentuan program studi ini masih harus dikaji lebih jauh karena harus disesuaikan dengan potensi wilayah, pemenuhan untuk dunia kerja serta disesuaikan pula dengan keterserapan lulusannya dalam dunia kerja.

4.11. Analisa Penentuan Lokasi Sekolah

Penentuan lokasi sekolah agar bisa digunakan secara maksimal butuh beberapa kriteria dimana lokasi itu harus mudah diakses, pada daerah aman, diluar jangkauan sekolah yang ada dan berorientasi pada pemerataan pendidikan.

Kriteria yang digunakan adalah:

- a. Berada dekat dengan jalan kolektor untuk menjamin tingkat aksesibilitas
- b. Jumlah penduduk usia sekolah menengah yang cukup tinggi
- c. Berada diluar jangkauan SMA yang sudah ada minimal pada jarak 3000 meter dimaksudkan untuk pemerataan
- d. Berada pada lokasi belukar, kebun, rumput atau tanah ladang dimaksudkan untuk pemanfaatan lahan semaksimal mungkin.



Sumber , Hasil Analisis 2009

GAMBAR 4.17
ALUR PEMIKIRAN PEMILIHAN LOKASI SEKOLAH

Jangkauan pelayanan sekolah dimaksudkan untuk melihat batas pelayanan sekolah, artinya bahwa diluar jangkauan pelayanan sekolah tersebut orang akan kesulitan untuk datang ke sekolah. Tetapi jangkauan pelayanan ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sarana prasarana transportasi meliputi kondisi jalan, kondisi alat angkutan dan faktor geografis. Dengan adanya sarana jalan yang memadai dan alat transportasi yang mencukupi maka akan mempermudah untuk bisa mencapai lokasi sekolah.

Hal lain yang sangat berpengaruh dalam aksesibilitas adalah faktor geografi, jarak yang lebih dekat dengan kondisi geografis yang sulit dilalui menjadikan waktu tempuh lebih lama atau lebih sulit menjangkau sekolah. Tetapi jarak yang jauh dengan sarana transportasi yang memadai akan lebih mudah untuk menuju sekolah.

Dengan permasalahan ini maka ditentukanlah standar jangkauan pelayanan sekolah. Standar-standar normatif yang ditentukan menggunakan berbagai macam acuan seperti jumlah penduduk atau ada juga yang menggunakan radius pelayanan.

Jangkauan pelayanan menggunakan jumlah penduduk kurang bisa melihat kondisi kebutuhan sekolah sebenarnya karena tidak memperhatikan jumlah penduduk usia sekolah yang ada. Sedangkan untuk bisa melihat daerah yang sudah terlayani pendidikan ataupun yang belum terlayani pendidikan akan lebih mudah jika menggunakan radius pelayanan. Radius pelayanan sekolah menengah atas berdasarkan SNI 03-1733 tahun 2004 adalah pada radius 3.000 meter.

Makin banyak jumlah penduduk atau kepadatan penduduk makin tinggi maka akan makin dibutuhkan sarana prasarana pendukung. Demikian juga halnya dengan sarana prasarana pendidikan. Berdasarkan acuan ini maka untuk membangun atau mendirikan sarana pendidikan diutamakan pada daerah yang belum terlayani pendidikan dan dengan jumlah penduduk usia sekolah yang cukup tinggi.

Dengan dibangunnya sarana pendidikan pada daerah yang belum terlayani sarana pendidikan maka akan dapat mencapai salah satu tujuan pendidikan yaitu pemerataan. Sedangkan berdasarkan jumlah penduduk maka daerah dengan jumlah penduduk yang tinggi akan lebih membutuhkan sarana pendidikan tersebut jika dibandingkan dengan daerah dengan jumlah penduduk yang lebih rendah.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pendirian sarana pendidikan adalah penggunaan lahan. Lahan untuk lokasi sarana pendidikan sebaiknya menggunakan lahan yang belum terbangun dan bukan merupakan daerah lindung atau konservasi tetapi menggunakan daerah kebun atau ladang. Pemilihan lahan ini diutamakan pula bukan pada lahan yang produktif seperti persawahan.

Pemilihan lahan untuk sarana pendidikan ini sebaiknya juga mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada pada masing masing daerah. Dengan pemilihan lahan yang tepat maka akan dapat memanfaatkan lahan secara efektif tanpa mengurangi fungsi lahan lahan lain yang lebih produktif. Pemilihan lahan ini juga memperhatikan faktor keamanan dan kenyamanan sarana pendidikan tersebut.

4.12. Sintesa Analisis

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa ketersediaan ruang kelas di SMA Negeri I Kertek sejumlah 15 ruang kelas. Untuk memenuhi jumlah siswa usia sekolah menengah di Kecamatan Kertek masih dibutuhkan lagi tambahan sebanyak 30 ruang kelas. Tambahan ruang kelas atau sekolah menengah ini disesuaikan dengan minat siswa dan orang tua serta kebijakan pemerintah berbentuk sekolah menengah kejuruan.

Penempatan lokasi sekolah menengah yang baru diharapkan pada lokasi optimal. Berdasarkan hasil *overlay* peta diketahui bahwa arahan lokasi calon sekolah menengah kejuruan yang dibutuhkan berada di Desa Candimulyo dan Desa Candiyanan. Titik lokasi arahan calon sekolah menengah kejuruan ini dipilih sebuah titik pada lokasi arahan sehingga jangkauan pelayanan sekolah menengah yang baru tidak tumpang tindih dengan jangkauan pelayanan sekolah menengah yang telah ada, tetapi jangkauan sekolah yang telah ada dan jangkauan sekolah menengah baru diharapkan bisa saling bersinggungan. Penentuan titik ini dimaksudkan untuk pemerataan layanan sekolah menengah sehingga diharapkan semua daerah di Kecamatan Kertek dapat terjangkau layanan sekolah menengah. Selain itu juga dipertimbangkan bahwa belum semua SLTP di Kecamatan Kertek masuk dalam jangkauan layanan sekolah menengah. Dengan dipilihnya titik arahan ini maka semua SLTP sudah masuk dalam jangkauan layanan sekolah menengah sehingga lebih memudahkan siswanya melanjutkan ke sekolah menengah.

Kriteria pembobotan digunakan untuk menentukan tingkatan prioritas arahan lokasi sekolah menengah yang disarankan. kriteria pembobotan yang digabungkan meliputi jangkauan sekolah menengah yang ada, jangkauan jalan, jumlah penduduk usia sekolah menengah dan penggunaan lahan.

TABEL IV.13
KRITERIA PEMBOBOTAN ARAHAN LOKASI SEKOLAH MENENGAH
KECAMATAN KERTEK TAHUN 2009

No	Uraian	Bobot	Keterangan
1	Jangkauan sekolah yang ada		
	Didalam jangkauan	1	
	Diluar jangkauan	2	
2	Jangkauan jalan kolektor		
	Diluar jangkauan	1	
	Didalam jangkauan	2	
3	Jumlah penduduk usia sekolah		

	Jumlah 125-223	1	
	Jumlah 224-363	2	
	Jumlah 364-571	3	
	Jumlah 572-747	4	
4	Penggunaan lahan		
	Pemukiman	1	
	Hutan	2	
	Sawah	3	
	Belukar	4	
	Ladang/Kebun	5	

Sumber : Hasil Analisi 2009

BAB V

PENUTUP

5.1 Temuan Studi

Setelah dilakukan analisis dan identifikasi pada studi ini ditemukan hal hal sebagai berikut:

- ✓ Daya tampung sesuai dengan Permendiknas no 24 tahun 2007 adalah 32 siswa tiap kelas, tetapi pada kenyataan di SMA Negeri I Kertek pada tahun pelajaran 2008-2009 rata rata tiap kelas hanya 24 orang.
- ✓ Radius pelayanan sekolah sejauh 3000 meter pada jalur mendatar, tetapi pada kenyataannya ada beberapa siswa yang berada diluar lingkup jangkauan pelayanan tersebut. Asal siswa terjauh di SMA Negeri I Kertek adalah dari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung yang berjarak 21 km dari sekolah.
- ✓ Pemilihan lokasi sekolah 64% siswa dan 65% orang tua memilih sekolah menengah diluar Kecamatan Kertek tetapi masih dalam lingkup Kabupaten Wonosobo, tetapi menganggap bahwa sekolah menengah di Kecamatan Kertek masih kurang (53%) dan setuju (88%) untuk dibangun sekolah menengah berupa sekolah menengah kejuruan (71%). Serta ada 13% siswa dan 15 % orangtua yang memilih sekolah menengah diluar Kabupaten Wonosobo.

5.2 Kesimpulan

Untuk pemerataan memperoleh kesempatan belajar pada jenjang sekolah menengah maka telah dilakukan analisis kebutuhan sekolah menengah di Kecamatan Kertek. Dari analisis yang telah dilakukan maka didapatkan kesimpulan hasil studi sebagai berikut:

- ✓ Terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan ruang kelas yang ada di Kecamatan Kertek yaitu ketersediaan 15 ruang kelas sedangkan kebutuhan 45 ruang kelas, jadi masih ada kekurangan 30 ruang kelas.
- ✓ Minat pemilihan jenis sekolah menengah lebih dominan untuk memilih Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal ini disebabkan bahwa siswa ingin memperoleh ketrampilan yang bisa langsung diterapkan untuk bisa terjun dalam dunia kerja.

Minat memilih sekolah kejuruan yang lebih dominan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang akan terus memperbanyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) .

Berdasarkan minat dan kebijakan pemerintah tersebut, maka jenis sekolah menengah yang dibutuhkan di Kecamatan Kertek berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

- ✓ Penentuan lokasi sekolah menengah kejuruan yang di butuhkan di Kecamatan Kertek agar bisa dimanfaatkan secara optimal perlu suatu tempat yang tepat. Tempat yang tepat tersebut harus memenuhi syarat mudah dijangkau, aman nyaman untuk proses pembelajaran, diluar jangkauan sekolah menengah yang ada dan berada pada jumlah penduduk yang tinggi serta pada lokasi gunalahan yang sesuai.

Dari syarat syarat tersebut setelah di analisis menggunakan *overlay* peta dapat ditentukan arahan lokasi sekolah menengah yang dibutuhkan yaitu di Desa Candi Mulyo dan Desa Candiyanan.

Lokasi titik arahan sekolah menengah yang akan dibangun disarankan pada suatu titik sehingga jangkauan sekolah yang telah ada dan jangkauan sekolah menengah yang akan dibangun tidak saling tumpang tindih, tetapi saling bersinggungan. Hal ini dimaksudkan untuk pemerataan jangkauan layanan sekolah menengah.

5.3 Rekomendasi

- ✓ Untuk pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Agar dicapai salah tujuan pembangunan pendidikan yaitu pemerataan pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan khususnya pendidikan menengah maka di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dengan jumlah penduduk usia sekolah yang ada masih dibutuhkan pembangunan sekolah menengah kejuruan dengan ruang kelas sebanyak 30 ruang kelas. Arahan lokasi pembangunan sekolah menengah kejuruan ini di Desa Candimulyo atau Desa Candiyanan

- ✓ Untuk penelitian lanjutan

Penentuan program keahlian pada sekolah menengah kejuruan yang akan dibangun masih perlu dikaji agar dapat disesuaikan dengan minat masyarakat, kesesuaian dengan potensi wilayah, kesesuaian dengan keterserapan lulusan pada dunia kerja.

Dengan didirikannya sekolah menengah kejuruan maka perlu suatu penelitian tentang program studi yang dibutuhkan. Hal ini diperlukan agar sekolah menengah yang akan didirikan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ketrampilan peserta didik agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang pada akhirnya akan dapat mengembangkan potensi wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, Ayu N. 2007. *Isu Isu Pendidikan*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional RI
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Daldjoeni, N. 1992. *Geografi Baru*. Bandung : Alumni
- Depdiknas. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Djoyodipuro, Marsudi. 1992. *Teori Lokasi*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Evans, Rupert. 1978. *Foundation of Vocational Education*. Salt Lake City: Olympus Publishing Company
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Grasindo
- Hagget, Peter. 1968. *Locational Analysis In Human Geography*. London : Edward Arnold LTD
- Kabupaten Wonosobo dalam angka tahun 2007. Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo. 2007.
- Kecamatan Kertek dalam angka tahun 2007. Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo. 2007.
- Kompas. tanggal 5 Agustus 2008
- Kumar, Khrisna. 1998. *Studi Penentuan Lokasi Pos Pemadam Kebakaran Di Kotamadya Jakarta Pusat*. Thesis Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang.
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Miles, Matthew B. 1992. Analisis Data Kualitatif (Terjemahan *Qualitative Data Analysis* oleh Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda Karya
- Nahdi, M. 2006. *Rasional SMA/MA Mencetak Pengangguran*. Pendidikan Network
- Nugroho, Riant. 2008. *Pendidikan Indonesia : Harapan, Visi dan Strategi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Pedoman Standar Pelayanan minimal menteri pemukiman dan prasarana wilayah no 534/KPTS/M/2001.
- Peraturan Pemerintah no 19 th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah no 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar
- Peraturan Menteri Pendidikan no 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah Menengah Atas
- Peraturan Menteri Pendidikan no 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan
- Profil Pendidikan Kabupaten Wonosobo tahun 2007. Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009
- Riduwan, 2007. *Skala Pengukuran Variabel Variabel Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Sirojuzilam, 2006. *Teori Lokasi*. Medan : USU Press
- Soegiyoharjo, Rinny. 2005. *Antara studi dan Karier akan kemana ?* Suara Pembaharuan 20 Mei 2005.
- Standar nasional Indonesia no 03-1733-2004
- Sugiyono, 2005. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : CV Alfabeta.
- Syaefudin, Udin. 2007. *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung: Rosda Karya

Tarigan,Robinson. 2006. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : Bumi Aksara

Tilaar,H.A.R dan Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Pendidikan, Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Undang-Undang no 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional

Usman,Husaini. 2006. *Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara

Wibowo, Agus. 2008. *Saatnya Memilih SMK*. Pikiran Rakyat. 12 Juli 2008.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



SABAR RIYANTO, lahir di Kota Wonosobo pada tanggal 15 Juni 1971. Penulis merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Slamet Wiryosukarto dan Sutiyah. Masa kecil penulis dihabiskan di Kelurahan Kertek Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah. Sejak bekerja penulis bertempat tinggal di Sumberdalem RT 5 / RW I Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.

Penulis mengawali pendidikan di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kertek, menyelesaikan pendidik dasar di SD Negeri I Kertek pada tahun 1983, SMP Negeri 1 Kertek pada tahun 1986, dan SMA Negeri 1 Wonosobo pada tahun 1989. Selanjutnya penulis meneruskan pendidikan di Pendidikan Matematika FPMIPA IKIP Negeri Semarang. Tahun 2007 hingga 2009 melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana di Semarang pada bidang studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro melalui program beasiswa unggulan dari Departemen Pendidikan Nasional. Pengalaman kerja diawali sebagai Guru Matematika di SMP Hasanuddin 06 Semarang tahun 1994 sampai dengan diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Pendidikan Nasional dan ditempatkan sebagai Guru Bidang Studi Matematika di SMA Negeri I Kertek Kabupaten Wonosobo mulai tahun 2000.

Pada tanggal 12 Oktober 1997 penulis menyunting Giyanti, S.Pd sebagai istri. Dari hasil perkawinan dikarunia 1 putri dan 1 putra yang penulis beri nama Alifah Nuha Nabila lahir pada tanggal 1 September 1998 dan Naufal Zaki Zaidan yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2003.



LEMBAR KUISIONER UNTUK SISWA SLTP

STUDI KEBUTUHAN SEKOLAH MENENGAH DI KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO

- Kuesioner ini disusun guna mengumpulkan informasi tertulis dalam rangka penyusunan penelitian (Tesis).
- Seluruh jawaban Kuesioner ini tetap akan dijaga kerahasiaannya dan hanya untuk tujuan akademis serta tidak untuk tujuan lain.
- Atas seluruh jawaban yang anda berikan, saya mengucapkan terima kasih.

Petunjuk Pengisian :

- a. Pengisian kuisisioner ini berbentuk pilihan berganda atau isian.
- b. Isilah pada jawaban yang telah disediakan dengan memilih jawaban yang sesuai dengan pilihan anda.
- c. Lingkarilah untuk jawaban yang dikehendaki.
- d. Sebagai panduan berikut ini kami paparkan pengertian yang berkaitan dengan pertanyaan yang kami sampaikan :
Yang dimaksud sekolah menengah adalah merupakan sekolah lanjutan pendidikan dasar, yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, Pendidikan menengah umum berbentuk sekolah menengah atas (SMA) dan madrasah aliyah (MA), sedangkan pendidikan menengah khusus berbentuk sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK).
Pendidikan menengah umum lebih mempersiapkan siswanya untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, sedangkan pendidikan menengah kejuruan lebih mempersiapkan lulusannya untuk bisa bekerja walaupun bisa juga untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

IDENTITAS RESPONDEN

NAMA	:
JENIS KELAMIN	Laki Laki Perempuan
SEKOLAH	:
KELAS	: IX (Sembilan)
TEMPAT TANGGAL LAHIR	:
ALAMAT RUMAH	:
JARAK RUMAH KE SEKOLAH	:

SARANA TRANSPORTASI UNTUK KE SEKOLAH	:
WAKTU YANG DIBUTUHKAN UNTUK SAMPAI SEKOLAH	:
NAMA ORANG TUA / WALI	:
PEKERJAAN ORANG TUA / WALI	:

I. PERTANYAAN UNTUK SISWA

1. Setelah lulus SLTP apakah anda akan melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Belum tahu
2. Jika anda berniat melanjutkan ke sekolah menengah, sekolah menengah apakah yang anda kehendaki ?
 - a. SMA
 - b. SMK
 - c. Lainnya (Madrasah Aliyah, Kejar Paket C dsb) sebutkan
.....

Kemukakan alasan anda :

.....

3. Jika anda berniat melanjutkan pendidikan ke SMK, jurusan atau program studi apa yang anda inginkan.
 - a. Otomotif
 - b. Pertanian
 - c. Informatika
 - d. Bisnis dan Manajemen
 - e. Bangunan
 - f. Lainnya sebutkan
4. Jika anda berniat melanjutkan pendidikan ke SMA, jurusan atau program studi apa yang anda inginkan.
 - a. IPA
 - b. IPS
 - c. BAHASA
5. Jika sekolah menengah di Kecamatan Kertek sudah mencukupi baik secara jumlah maupun kualitas, dimanakah anda memilih melanjutkan sekolah menengah?
 - a. Dalam Kecamatan Kertek
 - b. Diluar Kecamatan Kertek tapi masih dalam Kabupaten Wonosobo
 - c. Diluar Kabupaten Wonosobo
6. Siapakah yang membiayai pendidikan anda saat ini ?

- a. Orang Tua
 - b. Wali
 - c. Diri sendiri
 - d. Lainnya ,
7. Dengan alat transportasi apakah anda dapat sampai disekolah menengah tersebut ?
- a. Angkutan umum
 - b. Kendaraan pribadi (sepeda motor / mobil)
 - c. Jalan kaki
8. Dalam memilih sekolah menengah yang dikehendaki, dari siapa sajakah anda mendapat masukan atau arahan ? (jawaban bisa lebih dari satu)
- a. Diri sendiri
 - b. Orang Tua
 - c. Guru
 - d. Teman
 - e. Lainnya sebutkan.....

II. PERTANYAAN UNTUK ORANG TUA/WALI SISWA

1. Jika putra/putri anda berniat melanjutkan ke sekolah menengah, sekolah menengah apakah yang anda kehendaki ?
- a. SMA
 - b. SMK
 - c. Lainnya (Madrasah Aliyah, Kejar Paket C dsb) sebutkan

Kemukakan alasan anda :

.....

.....

.....

.....

2. Dimanakah lokasi sekolah menengah yang anda harapkan untuk kelanjutan pendidikan putra/putri anda tersebut ?
- a. Dalam Kecamatan Kertek
 - b. Diluar Kecamatan Kertek tapi masih dalam Kabupaten Wonosobo
 - c. Diluar Kabupaten Wonosobo
- Kemukakan Alasannya

.....

.....

.....

.....

.....

3. Dengan hanya memiliki satu sekolah menengah, bagaimanakah pendapat anda tentang sekolah menengah yang ada di Kecamatan Kertek Kabupaten

- Wonosobo jika dibandingkan banyaknya lulusan SLTP sekitar 700 siswa tiap tahunnya?
- a. Kurang
 - b. Cukup
 - c. Terlalu Banyak
4. Jika di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo akan dibangun sekolah menengah, setujukah anda ?
- a. Setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Tidak tahu
5. Jenis sekolah menengah apakah yang sebaiknya di bangun di Kecamatan Kertek ?
- a. SMA
 - b. SMK
 - c. Lainnya (Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Kejuruan, dsb)
6. Di desa atau kelurahan manakah sebaiknya sekolah menengah di Kecamatan Kertek tersebut dibangun atau didirikan ?

.....

Alasannya

.....
.....
.....
.....
.....

7. Berapakah penghasilan anda dalam satu bulan?
- a. Kurang dari Rp. 1.000.000,00
 - b. Rp. 1.000.000,00 – Rp. 1.500.000,00
 - c. Rp. 1.500.000,00 – Rp. 2.000.000,00
 - d. Rp. 2.000.000,00 – Rp. 2.500.000,00
 - e. Rp. 2.500.000,00 – Rp. 3.000.000,00
 - f. Lebih dari Rp. 3.000.000,00

III. SARAN , USULAN DAN HARAPAN

Berikan saran, usul dan harapan anda tentang kebutuhan sekolah menengah di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....